



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan penyusunan anggaran dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada indikator Kinerja, tolak ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja, standar harga satuan, rencana kebutuhan BMD dan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta untuk memberikan pedoman kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyusunan anggaran, program dan kegiatan sebagai dasar untuk melaksanakan penilaian kinerja, maka perlu disusun standar satuan harga tahun anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4651);
26. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, dan Laporan Pertanggungjawaban

- Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 30. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 2 Seri E.1);
 31. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 3 Seri E.2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8);
 32. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 15);
 33. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 16), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 74);

34. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kota Sawahlunto Nomor 75);
35. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 76);
36. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bumi Sawahlunto Mandiri (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10);
37. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 77);
38. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 68);

39. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 52);
40. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
41. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
42. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
43. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 8);

44. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);
45. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Unsur Pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Standar Satuan Harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

6. Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2020 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya keluaran (output) suatu kegiatan dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

- a. untuk memberikan pedoman bagi OPD dalam perhitungan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan RKA-OPD; dan
- b. sebagai dasar pelaksanaan anggaran, Standar Satuan Harga merupakan batas tertinggi dan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

BAB II

STANDAR SATUAN HARGA OPD

Pasal 3

- (1) Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2020 berlaku untuk :
 - a. beberapa / seluruh Organisasi Perangkat Daerah; atau
 - b. 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah tertentu.
- (2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usulan OPD dan telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetujui dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
 - b. Adanya kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari :
 - a. Lampiran I : Standar Biaya Gaji dan Tunjangan DPRD, Tambahan Penghasilan, Tim Kepanitiaan dan Honorarium Kegiatan
 - b. Lampiran II : Standar Honorarium Pegawai Tidak Tetap, Honorarium Upah Harian dan Jasa Petugas Kebersihan

- c. Lampiran III : Standar Biaya Belanja Barang dan Jasa
- d. Lampiran IV : Standar Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan APBD

- (5) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk pelaksanaan RKA-OPD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan RKA-OPD Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran harus berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan RKA-OPD, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Satuan Harga lainnya yang antara lain didasarkan pada :
 - a. Harga pasar yang telah dilakukan survei harga oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - b. Standar Satuan Harga yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah/instansi teknis yang berwenang.
- (3) Penggunaan Standar Satuan Harga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Standar Satuan Harga yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas bagi pejabat negara, pegawai negeri dan non pegawai negeri yang dipekerjakan dalam rangka melaksanakan tugas rutin OPD.
- (4) Penggunaan Standar Satuan Harga lainnya yang menambah penghasilan dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kesesuaian dan kebenaran formal dan material terhadap penggunaan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Penggunaan Standar Satuan Harga lainnya dalam penyusunan RKA-OPD disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh kepala OPD selaku Pengguna Anggaran.
- (7) Pengawasan atas penggunaan Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Standar Satuan Harga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 12 Agustus 2019
WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 12 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019 NOMOR 44

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 44 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2019

TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2020

Standar Biaya Gaji dan Tunjangan DPRD, Tambahan Penghasilan, Tim Kepanitiaan dan Honorarium Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Gaji dan Tunjangan		Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku	
1.1	Gaji Pokok / Uang Representasi	Perbulan		
	a. Gaji Pokok Wako/Wawako			
	b. Gaji Pokok Pegawai (PNS)			
	c. Uang Representasi DPRD			
	1) Ketua DPRD			
	2) Wakil Ketua DPRD			
	3) Anggota DPRD			
1.2	Tunjangan Keluarga	Perbulan		
	a. Tunjangan Keluarga (PNS)			
	b. Tunjangan Keluarga (DPRD)			
	1) Ketua DPRD			
	2) Wakil Ketua DPRD			
	3) Anggota DPRD			
1.3	Tunjangan Jabatan	Perbulan		
	a. Pegawai Negeri Sipil			
	b. Tunjangan Jabatan Walikota/Wakil Walikota			
	c. Uang Jabatan DPRD			
	1) Ketua DPRD			
	2) Wakil Ketua DPRD			
	3) Anggota DPRD			
1.4	Tunjangan Fungsional	Perbulan		
1.5	Tunjangan Fungsional Umum	Perbulan		
1.6	Tunjangan Beras	Perbulan/ Perjiwa/ Kg		
	a. Pegawai Negeri Sipil			
	b. Walikota/Wakil Walikota			
	c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			
1.7	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	Perbulan		
	a. Pegawai Negeri Sipil			
	b. Walikota/Wakil Walikota			
	c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			
1.8	Pembulatan Gaji	Perbulan		
1.9	Iuran Asuransi Kesehatan		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :			
	a. Premi Asuransi			
	1) Asuransi Kesehatan			
	2) Iuran Kematian			
	3) Iuran Kecelakaan Kerja			
	b. General Cek Up			
			BPJS	
			Berdasarkan Peraturan yang berlaku	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	1.10 Uang Paket <ul style="list-style-type: none">a. Ketua DPRDb. Wakil Ketua DPRDc. Anggota DPRD		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	1.11 Tunjangan Panitia Musyawarah <ul style="list-style-type: none">a. Ketua DPRDb. Wakil Ketua DPRDc. Sekretarisd. Anggota DPRD		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	1.12 Tunjangan Komisi <ul style="list-style-type: none">a. Ketua DPRDb. Wakil Ketua DPRDc. Sekretarisd. Anggota DPRD		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	1.13 Tunjangan Panitia Anggaran <ul style="list-style-type: none">a. Ketua DPRDb. Wakil Ketua DPRDc. Sekretarisd. Anggota DPRD		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	1.14 Tunjangan Badan Kehormatan <ul style="list-style-type: none">a. Ketua DPRDb. Wakil Ketua DPRDc. Anggota DPRD		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	1.15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya <ul style="list-style-type: none">a. Ketua DPRDb. Wakil Ketua DPRDc. Anggota DPRD		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	1.16 Tunjangan Perumahan <ul style="list-style-type: none">a. Ketua DPRDb. Wakil Ketua DPRDc. Anggota DPRD		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	1.17 Uang Duka Wafat/Tewas		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	1.18 Uang Jasa Pengabdian		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	1.19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD <ul style="list-style-type: none">a. Ketua DPRDb. Wakil Ketua DPRD		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
	1.20 Tunjangan Transportasi <ul style="list-style-type: none">a. Tunjangan Komunikasi Insentifb. Tunjangan Resesc. Besaran Belanja Rumah Tangga Pimpinan		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
2	Tambahan Penghasilan Pegawai		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH / WKDH		Berdasarkan Peraturan yang berlaku	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
4	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	Berdasarkan Peraturan yang berlaku		
5	Uang Lembur	Ditetapkan dengan Keputusan Walikota		
6	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)			
	a. Pengarah	orang/bulan	15,000,000	
	b. Wakil Pengarah	orang/bulan	12,500,000	
	c. Koordinator / Ketua TAPD	orang/bulan	5,000,000	
	d. Koordinator Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga	orang/bulan	4,000,000	
	e. Koordinator Bidang Administrasi Pembangunan	orang/bulan	4,000,000	
	f. Koordinator Bidang Administrasi Keuangan	orang/bulan	4,000,000	
	g. Ketua Perencana Anggaran	orang/bulan	4,000,000	
	h. Ketua Perencana Program	orang/bulan	4,000,000	
	i. Sekretaris	orang/bulan	3,750,000	
	j. Fasilitasi Bidang Anggaran	orang/bulan	3,500,000	
	k. Fasilitasi Bidang pada BPKAD	orang/bulan	3,000,000	
	l. Fasilitasi Perencana Program	orang/bulan	3,000,000	
	m. Anggota Fasilitasi Bidang Anggaran	orang/bulan	2,500,000	
	n. Fasilitasi Administrasi Pembangunan	orang/bulan	2,500,000	
	o. Fasilitasi Administrasi Statistik, Perekonomian dan Pembangunan	orang/bulan	2,500,000	
	p. Fasilitasi Bidang Hukum dan Perundang-undangan	orang/bulan	2,500,000	
	q. Fasilitasi Hubungan antar lembaga	orang/bulan	2,500,000	
	r. Tim Entri	orang/bulan	1,500,000	
7	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber			
	a. Widyaswara			
	- Widyaswara Utama	/orang/materi	800,000	
	- Widyaswara Madya	/orang/materi	600,000	
	- Widyaswara Muda	/orang/materi	500,000	
	- Widyaswara Pertama	/orang/materi	400,000	
	b.			
	Tenaga Ahli/ Fasilitator/ Instruktur/ Narasumber			
	- Berasal dari Dalam Kota Sawahlunto	/orang/jam pelajaran	150,000	
	- Berasal dari Luar Kota dalam Provinsi			
	1) Eselon II / disetarakan	/orang/jam pelajaran	300,000	
	2) Eselon III kebawah/ disetarakan	/orang/jam pelajaran	250,000	
	3) Akademisi	/orang/jam pelajaran	225,000	
	4)	/orang/jam pelajaran	200,000	
	Tenaga Ahli Non Struktural /Non Akademisi			
	- Berasal dari Luar Kota Luar Provinsi			
	1) Eselon II / disetarakan	/orang/jam pelajaran	1,000,000	
	2) Eselon III kebawah/ disetarakan	/orang/jam pelajaran	900,000	
	3) Akademisi	/orang/jam pelajaran	800,000	
	4)	/orang/jam pelajaran	600,000	
	Tenaga Ahli Non Struktural /Non Akademisi			
	c. Tenaga Ahli / Dewan Pakar	orang/pertemuan	Berdasarkan Persetujuan Kepala Daerah	
	d. Tenaga Ahli / Dewan Pakar (bulanan)	orang/bulan		
	e. Keynote Speaker (Walikota/Wakil Walikota)	orang/pertemuan	1,000,000	
	f. Honorarium Tenaga Ahli/ Fasilitator/ Instruktur/ Narasumber BPKP Provinsi Sumbar			
	- Pembantu Penanggung Jawab	Perorang/Per jam	450,000	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	- Pengendali Teknis	Perorang/Per jam	450,000	
	- Ketua / Anggota Tim	Perorang/Per jam	350,000	
	- Tim Pusat	Perorang/Per jam	450,000	
8	Belanja Jasa Tim Penilai Perlombaan (Juri/Dewan Hakim dan Lainnya)			
	a. Berasal dari Dalam Kota Sawahlunto	Perorang/Per hari	200,000	
	b. Berasal dari Luar Kota dalam Provinsi	Perorang/Per hari	250,000	
	c. Berasal dari Luar Kota Luar Provinsi	Perorang/Per hari	350,000	
	d. Juri / Penilai Event Wisata	Perorang/Per hari	1,500,000	
9	Honorarium Tim Koordinasi Pemantauan Orang dan Organisasi Masyarakat Serta Tenaga Kerja Asing di Kota Sawahlunto			
	- Anggota	orang/bulan	150,000	
	- Petugas Imigrasi merangkap anggota	orang/bulan	200,000	
10	Honorarium Tim Kewaspadaan Dini di Daerah			
	a. Honorarium Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah			
	- Ketua	orang/bulan	1,000,000	
	b. Honorarium Pengurus FKDM Kota Sawahlunto			
	- Ketua	orang/bulan	750,000	
	- Wakil Ketua Merangkap Sekretaris	orang/bulan	650,000	
	- Anggota	orang/bulan	500,000	
11	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)			
	- Walikota (ketua)	orang/bulan	6,500,000	
	- Wakil Walikota (anggota)	orang/bulan	6,000,000	
	- Kapolres (anggota)	orang/bulan	6,000,000	
	- Dandim (anggota)	orang/bulan	6,000,000	
	- Kajari (anggota)	orang/bulan	6,000,000	
	- Ketua DPRD (anggota)	orang/bulan	6,000,000	
12	Honorarium Terkait Kegiatan Fasilitasi Keamanan pada Hari-hari Besar, Pelaksanaan Event Daerah, Nasional dan Internasional dan Pergantian Tahun Baru			
	a. Tim Instansi Terkait			
	- Walikota	orang/kegiatan	5,000,000	
	- Wakil Walikota	orang/kegiatan	5,000,000	
	- Kapolres	orang/kegiatan	5,000,000	
	- Dandim	orang/kegiatan	5,000,000	
	- Kajari	orang/kegiatan	5,000,000	
	- Ketua Pengadilan	orang/kegiatan	5,000,000	
	- Ketua DPRD	orang/kegiatan	5,000,000	
	- Sekretaris Daerah	orang/kegiatan	4,000,000	
	- Wakapolres	orang/kegiatan	3,000,000	
	- Kasdim	orang/kegiatan	3,000,000	
	- Wakil Ketua Pengadilan	orang/kegiatan	3,000,000	
	- Wakil Ketua DPRD	orang/kegiatan	3,000,000	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	b. Posko kegiatan			
	- Posko Polres	posko/keg	2,000,000	
	- Posko Polsek	posko/keg	2,000,000	
	- Poskotis	posko/keg	3,000,000	
	- Posko Kesbang	posko/keg	2,000,000	
13	Honorarium Anggota Pengamanan Kegiatan Fasilitasi Keamanan pada Hari-hari Besar, Pelaksanaan Event Daerah, Nasional dan Internasional dan Pergantian Tahun Baru dan Petugas Pengamanan			
	- Setara Golongan IV	OK	60,000	
	- Setara Golongan III	OK	50,000	
	- Setara Golongan II	OK	40,000	
	- Setara Golongan I dan Non PNS	OK	30,000	
14	Honorarium Penyelesaian Kerugian Daerah			
	a. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah			
	- Ketua	orang/sidang	5,000,000	
	- Wakil Ketua	orang/sidang	4,000,000	
	- Pelaksana Tugas	orang/sidang	1,000,000	
	b. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah			
	- Ketua	orang/sidang	1,500,000	
	- Wakil Ketua	orang/sidang	1,000,000	
	- Anggota	orang/sidang	750,000	
	c. Sekretariat			
	- Ketua	orang/sidang	750,000	
	- Wakil Ketua	orang/sidang	500,000	
	- Anggota	orang/sidang	400,000	
15	Honorarium P2TP2A			
	- Pengurus Mendampingi Kasus	orang/kasus	250,000	
	- Pengacara/Organisasi Bantuan Hukum yang Mendampingi Kasus sidang peradilan			
	- Pengacara/Organisasi Bantuan Hukum Litigasi/Non Litigasi untuk Orang Miskin	kasus	10,000,000	
16	Honorarium KOMINDA Kota Sawahlunto			
	- Ketua	orang/bulan	2,000,000	
	- Wakil Ketua	orang/bulan	1,500,000	
	- Ketua Pelaksana Harian	orang/bulan	600,000	
	- Anggota	orang/bulan	400,000	
17	Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Cabang			
	- Danramil	orang/bulan	600,000	
	- Kapolsek	orang/bulan	600,000	
18	Honorarium Instansi Terkait Kegiatan Monitoring Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif			
	- Pengarah	OB	750,000	
	- Wakil Ketua Harian	OB	450,000	
	- Anggota	OB	250,000	
	- Tim Pemantau TPS	OB	100,000	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
19	Jasa Pengamanan/Foreder			
	a. Dalam Kota	unit/kegiatan	300,000	
	b. Luar Kota	unit/kegiatan	1,250,000	
	c. Petugas pelaksanaan pembantu protokoler di bandara	OB	750,000	
20	Petugas pelayanan pada Dinas PMPTSP	orang/bulan	500,000	
21	Pengelolaan Keuangan dan Barang			
	I. Penatausahaan Keuangan			
	a. Pengguna Anggaran			
	Biaya Kerja Maksimum s.d Rp.1 Milyar	orang/bulan	2,000,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.5 Milyar	orang/bulan	2,250,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp.10 Milyar	orang/bulan	2,500,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp.15 Milyar	orang/bulan	2,750,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 15 Milyar s/d Rp.50 Milyar	orang/bulan	3,000,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas diatas Rp. 50 Milyar	orang/bulan	3,250,000	
	b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
	Biaya Kerja Maksimum s.d Rp.1 Milyar	orang/bulan	1,250,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.5 Milyar	orang/bulan	1,300,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp.10 Milyar	orang/bulan	1,350,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp.15 Milyar	orang/bulan	1,400,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 15 Milyar s/d Rp.50 Milyar	orang/bulan	1,450,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas diatas Rp. 50 Milyar	orang/bulan	1,500,000	
	c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kelurahan			
	Biaya Kerja Maksimum s.d Rp.1 Milyar	orang/bulan	625,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.5 Milyar	orang/bulan	650,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp.10 Milyar	orang/bulan	675,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp.15 Milyar	orang/bulan	700,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 15 Milyar s/d Rp.50 Milyar	orang/bulan	725,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas diatas Rp. 50 Milyar	orang/bulan	750,000	
	d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD			
	Biaya Kerja Maksimum s.d Rp.1 Milyar	orang/bulan	700,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.5 Milyar	orang/bulan	900,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp.10 Milyar	orang/bulan	1,100,000	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp.15 Milyar	orang/bulan	1,350,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 15 Milyar s/d Rp.50 Milyar	orang/bulan	1,550,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas diatas Rp. 50 Milyar	orang/bulan	1,750,000	
	e. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan			
	Biaya Kerja Maksimum s.d Rp.1 Milyar	orang/bulan	350,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.5 Milyar	orang/bulan	450,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp.10 Milyar	orang/bulan	550,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp.15 Milyar	orang/bulan	675,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 15 Milyar s/d Rp.50 Milyar	orang/bulan	775,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas diatas Rp. 50 Milyar	orang/bulan	875,000	
	f. Bendahara Pengeluaran			
	Biaya Kerja Maksimum s.d Rp.1 Milyar	orang/bulan	500,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.5 Milyar	orang/bulan	700,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp.10 Milyar	orang/bulan	900,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp.15 Milyar	orang/bulan	1,100,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 15 Milyar s/d Rp.50 Milyar	orang/bulan	1,300,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas diatas Rp. 50 Milyar	orang/bulan	1,500,000	
	g. Bendahara Pengeluaran Pembantu			
	Biaya Kerja Maksimum s.d Rp.1 Milyar	orang/bulan	350,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.5 Milyar	orang/bulan	400,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp.10 Milyar	orang/bulan	450,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp.15 Milyar	orang/bulan	500,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 15 Milyar s/d Rp.50 Milyar	orang/bulan	550,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas diatas Rp. 50 Milyar	orang/bulan	600,000	
	h. Bendahara Penerima			
	Biaya Kerja Maksimum s.d Rp.1 Milyar	orang/bulan	250,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.5 Milyar	orang/bulan	300,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp.10 Milyar	orang/bulan	350,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp.15 Milyar	orang/bulan	400,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 15 Milyar s/d Rp.50 Milyar	orang/bulan	450,000	

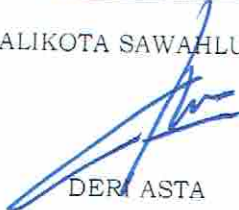
No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	Biaya Kerja Maksimum diatas diatas Rp. 50 Milyar	orang/bulan	500,000	
	i. Bendahara Penerima Pembantu			
	Biaya Kerja Maksimum s.d Rp.1 Milyar	orang/bulan	150,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.5 Milyar	orang/bulan	170,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp.10 Milyar	orang/bulan	190,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp.15 Milyar	orang/bulan	210,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 15 Milyar s/d Rp.50 Milyar	orang/bulan	230,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas diatas Rp. 50 Milyar	orang/bulan	250,000	
	j. Pembantu Bendahara Pengeluaran			
	Biaya Kerja Maksimum s.d Rp.1 Milyar	orang/bulan	300,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.5 Milyar	orang/bulan	350,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp.10 Milyar	orang/bulan	400,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp.15 Milyar	orang/bulan	450,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 15 Milyar s/d Rp.50 Milyar	orang/bulan	500,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas diatas Rp. 50 Milyar	orang/bulan	550,000	
	k. Pembantu Bendahara Penerima			
	Biaya Kerja Maksimum s.d Rp.1 Milyar	orang/bulan	150,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.5 Milyar	orang/bulan	170,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp.10 Milyar	orang/bulan	190,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp.15 Milyar	orang/bulan	210,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas Rp. 15 Milyar s/d Rp.50 Milyar	orang/bulan	230,000	
	Biaya Kerja Maksimum diatas diatas Rp. 50 Milyar	orang/bulan	250,000	
	II. Pengurus Barang			
	a. Pengurus Barang OPD			
	Nilai Aset s.d Rp.2,5 Milyar	orang/bulan	400,000	
	Nilai Aset diatas Rp.2,5 Milyar s/d Rp.5 Milyar	orang/bulan	500,000	
	Nilai Aset diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp.10 Milyar	orang/bulan	600,000	
	Nilai Aset diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp.25 Milyar	orang/bulan	700,000	
	Nilai Aset diatas Rp.25 Milyar s/d Rp.125 Milyar	orang/bulan	850,000	
	Nilai Aset diatas Rp. 125 Milyar	orang/bulan	1,000,000	
	b. Pembantu Pengurus Barang OPD			
	Nilai Aset s.d Rp.2,5 Milyar	orang/bulan	300,000	
	Nilai Aset diatas Rp.2,5 Milyar s/d Rp.5 Milyar	orang/bulan	400,000	
	Nilai Aset diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp.10 Milyar	orang/bulan	500,000	
	Nilai Aset diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp.25 Milyar	orang/bulan	600,000	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	Nilai Aset diatas Rp.25 Milyar s/d Rp.125 Milyar	orang/bulan	675,000	
	Nilai Aset diatas Rp. 125 Milyar	orang/bulan	750,000	
	c. Pengurus Barang Kota			
	Ketua	orang/bulan	850,000	
	Anggota	orang/bulan	500,000	
	Sekretariat	orang/bulan	400,000	
	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)			
	PPKD / BUD	orang/bulan	2,500,000	
	Kuasa BUD	orang/bulan	2,000,000	
	Anggota	orang/bulan	500,000	
	Sekretariat	orang/bulan	400,000	
22	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa			
	a. Kepala UKPBJ	orang/bulan	1,800,000	
	b. Unit Pengelola Pengadaan Barang/Jasa			
	Kepala	orang/bulan	1,600,000	
	Pokja Pemilihan	orang/bulan	1,500,000	
	c. Unit Pengelola Layanan pengadaan secara elektronik			
	Kepala	orang/bulan	1,000,000	
	Admin/Verifikator/Trainer/Help Desk	orang/bulan	850,000	
	d. Unit Advokasi dan Pembinaan			
	Kepala	orang/bulan	1,000,000	
	Anggota	orang/bulan	850,000	
23	Pelaksana Pekerjaan Non Konstruksi			
	a. Tidak Terkontrak/Non SPK			
	- PPK			
	Pagu Anggaran 25 Juta s.d 50 Juta	orang/kegiatan	125,000	
	Pagu Anggaran diatas 50 Juta s.d 100 Juta	orang/kegiatan	150,000	
	Pagu Anggaran diatas 100 Juta s.d 200 Juta	orang/kegiatan	175,000	
	Pagu Anggaran diatas 200 Juta s.d 500 Juta	orang/kegiatan	200,000	
	Pagu Anggaran diatas 500 Juta	orang/kegiatan	225,000	
	- Pejabat Pengadaan/ULP			
	Pagu Anggaran 25 Juta s.d 50 Juta	orang/kegiatan	100,000	
	Pagu Anggaran diatas 50 Juta s.d 100 Juta	orang/kegiatan	125,000	
	Pagu Anggaran diatas 100 Juta s.d 200 Juta	orang/kegiatan	150,000	
	Pagu Anggaran diatas 200 Juta s.d 500 Juta	orang/kegiatan	175,000	
	Pagu Anggaran diatas 500 Juta	orang/kegiatan	200,000	
	- Pejabat Penerima Hasil			
	Pagu Anggaran 25 Juta s.d 50 Juta	orang/kegiatan	100,000	
	Pagu Anggaran diatas 50 Juta s.d 100 Juta	orang/kegiatan	125,000	
	Pagu Anggaran diatas 100 Juta s.d 200 Juta	orang/kegiatan	150,000	
	Pagu Anggaran diatas 200 Juta s.d 500 Juta	orang/kegiatan	175,000	
	Pagu Anggaran diatas 500 Juta	orang/kegiatan	200,000	
	2. Terkontrak / SPK			
	- PPK			
	Pagu Anggaran 50 Juta s.d 100 Juta	orang/paket	150,000	
	Pagu Anggaran diatas 100 Juta s.d 200 Juta	orang/paket	175,000	
	Pagu Anggaran diatas 100 Juta s.d 200 Juta	orang/paket	185,000	Jasa Konsultan
	Pagu Anggaran diatas 200 Juta s.d 500 Juta	orang/paket	200,000	
	Pagu Anggaran diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	orang/paket	225,000	
	Pagu Anggaran diatas 1 Milyar	orang/paket	250,000	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	- Pejabat Pengadaan/ULP			
	Pagu Anggaran 50 Juta s.d 100 Juta	orang/paket	125,000	
	Pagu Anggaran diatas 100 Juta s.d 200 Juta	orang/paket	150,000	
	Pagu Anggaran diatas 100 Juta s.d 200 Juta		Pokja ULP	Jasa Konsultan
	Pagu Anggaran diatas 200 Juta s.d 500 Juta		Pokja ULP	
	Pagu Anggaran diatas 500 Juta s.d 1 Milyar		Pokja ULP	
	Pagu Anggaran diatas 1 Milyar		Pokja ULP	
	- Panitia Penerima Hasil			
	Pagu Anggaran 50 Juta s.d 100 Juta	orang/paket	125,000	
	Pagu Anggaran diatas 100 Juta s.d 200 Juta	orang/paket	150,000	
	Pagu Anggaran diatas 100 Juta s.d 200 Juta	orang/paket	450,000	Jasa Konsultan
	Pagu Anggaran diatas 200 Juta s.d 500 Juta			
	Ketua	orang/paket	175,000	
	Sekretaris	orang/paket	165,000	
	Anggota	orang/paket	155,000	
	Pagu Anggaran diatas 500 Juta s.d 1 Milyar			
	Ketua	orang/paket	200,000	
	Sekretaris	orang/paket	190,000	
	Anggota	orang/paket	180,000	
	Pagu Anggaran diatas 1 Milyar			
	Ketua	orang/paket	225,000	
	Sekretaris	orang/paket	215,000	
	Anggota	orang/paket	205,000	
22	Pelaksana Pekerjaan Konstruksi			
	a. Belanja Jasa Perencanaan			
	Nilai Fisik s.d 50 Juta	/paket pekerjaan	2.50%	Persentase dikali
	Nilai Fisik diatas 50 Juta s.d 100 Juta	/paket pekerjaan	2.00%	dengan Nilai Fisik
	Nilai Fisik diatas 100 Juta s.d 200 Juta	/paket pekerjaan	1.75%	
	Nilai Fisik diatas 200 Juta s.d 500 Juta	/paket pekerjaan	1.00%	Susunan dan
	Nilai Fisik diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	/paket pekerjaan	0.50%	jumlah personil
	Nilai Fisik diatas 1 Milyar s.d 5 Milyar	/paket pekerjaan	0.35%	perencanaan
	Nilai Fisik diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	/paket pekerjaan	0.20%	kontruksi
	Nilai Fisik diatas diatas 10 Milyar	/paket pekerjaan	0.15%	ditetapkan dengan
				SK Kapala Dinas
				Pekerjaan Umum
				dan Penataan
				Ruang
	b. Belanja Jasa Pengawasan			
	Nilai Fisik s.d 50 Juta	orang/paket /bulan	225,000	
	Nilai Fisik diatas 50 Juta s.d 100 Juta	orang/paket /bulan	270,000	
	Nilai Fisik diatas 100 Juta s.d 200 Juta	orang/paket /bulan	315,000	
	Nilai Fisik diatas 200 Juta s.d 500 Juta	orang/paket /bulan	360,000	
	Nilai Fisik diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	orang/paket /bulan	450,000	
	Nilai Fisik diatas 1 Milyar s.d 5 Milyar	orang/paket /bulan	540,000	
	Nilai Fisik diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	orang/paket /bulan	675,000	
	Nilai Fisik diatas diatas 10 Milyar	orang/paket /bulan	900,000	
	c. Pengelola Kegiatan			
	Nilai Fisik s.d 50 Juta	orang/paket /bulan	315,000	
	Nilai Fisik diatas 50 Juta s.d 100 Juta	orang/paket /bulan	450,000	
	Nilai Fisik diatas 100 Juta s.d 200 Juta	orang/paket /bulan	540,000	
	Nilai Fisik diatas 200 Juta s.d 500 Juta	orang/paket /bulan	675,000	
	Nilai Fisik diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	orang/paket /bulan	900,000	
	Nilai Fisik diatas 1 Milyar s.d 5 Milyar	orang/paket /bulan	1,125,000	
	Nilai Fisik diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	orang/paket /bulan	1,350,000	
	Nilai Fisik diatas diatas 10 Milyar	orang/paket /bulan	1,620,000	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	d. Pejabat Pengadaan			
	Nilai Fisik s.d 50 Juta	orang/paket	200,000	
	Nilai Fisik diatas 50 Juta s.d 100 Juta	orang/paket	250,000	
	Nilai Fisik diatas 100 Juta s.d 200 Juta	orang/paket	300,000	
	Nilai Fisik diatas diatas 200 Juta		Pokja ULP	
	d. Pejabat/Panitia Penerima Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP)			
	Pejabat Penerima Pemeriksa Hasil Pekerjaan	orang/kegiatan	250,000	
	Panitia Penerima Pemeriksa Hasil Pekerjaan			
	Nilai Fisik diatas 200 Juta s.d 500 Juta	orang/kegiatan	850,000	Susunan dan jumlah personil perencanaan kontruksi ditetapkan dengan SK Kapala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Nilai Fisik diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	orang/kegiatan	1,000,000	
	Nilai Fisik diatas 1 Milyar s.d 5 Milyar	orang/kegiatan	1,200,000	
	Nilai Fisik diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	orang/kegiatan	1,400,000	
	Nilai Fisik diatas diatas 10 Milyar	orang/kegiatan	1,600,000	

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 44 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2019

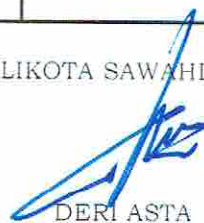
TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2020

Standar Honorarium Pegawai Tidak Tetap, Honorarium Upah Harian dan Jasa Petugas Kebersihan

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap			
a.	Gaji Pegawai Honor/Pegawai Kontrak/Pegawai Kontrak Khusus	orang/bulan	Sesuai SK Wako	
b.	Honorarium Tenaga Ahli Fraksi pada Sekretariat DPRD	orang/bulan	3,000,000	
c.	Honorarium Programer/IT	orang/bulan	2,850,000	
d.	Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) DAK	orang/bulan	2,850,000	
e.	Operator E-monitoring DAK	orang/bulan	500,000	
2.	Belanja Jasa RT/RW, Blok Rusunawa			
-	Honorarium RW	orang/bulan	500,000	
-	Honorarium RT	orang/bulan	450,000	
-	Linmas Kelurahan	orang/bulan	400,000	
-	Ketua Blok rusunawa	orang/bulan	300,000	
-	Pengelola Blok rusunawa	orang/bulan	250,000	
3	Honorarium Upah Harian			
a.	Upah Harian Mandor/ Kepala Tukang/ Tukang.	orang/hari	Berdasarkan Harga Standar yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum	
b.	Upah Harian Jasa Buruh/ Operator Alat Berat/ Tenaga Labor/ Pekerja Lepas Administrasi/ Pekerja Lepas Lapangan/ Inspeksi Lampu Jalan Umum/ Penjaga Malam/Jasa Angkut Limbah	orang/hari	65,000	
c.	Upah Harian Petugas Kebersihan UPTD Rusunawa	orang/hari	55,000	
4	Kegiatan Petugas Keagamaan/ Kemasyarakatan Kota Sawahlunto			Dengan Pesetujuan Wako
-	Jasa Guru TPQ/TPSQ/MDA	OB	500,000	
-	Jasa Garim Masjid	OB	500,000	
-	Jasa Garim Mushalla	OB	500,000	
-	Jasa Imam Masjid	OB	1,250,000	
-	Jasa Muazzin Masjid	OB	750,000	
-	Jasa Guru Rumah Tahfizh	/pondok	2,000,000	
-	Jasa Penyelenggara Jenazah	kelompok/bln	500,000	
-	Jasa Penceramah Nasional	OK	50,000,000	
-	Jasa Penceramah Luar Daerah	OK	2,000,000	
-	Jasa Khatib Shalat Hari Raya Luar Daerah	OK	2,000,000	
-	Jasa Khatib Cadangan Shalat Hari Raya Islam	OK	1,000,000	
-	Jasa Imam Shalat Hari Raya	OK	1,500,000	
-	Jasa Pemandu Malam Takbiran Hari Raya	OK	300,000	
-	Honorarium Mubaligh Tim Ramadhan	OH	200,000	
5	Kegiatan Hari Besar Nasional			
-	Honorarium Perwira Upacara	OK	100,000	
-	Honorarium Komandan Upacara	OK	100,000	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	- Honorarium Pembawa Acara	OK	100,000	
	- Honorarium Pembaca Teks UUD 1945	OK	75,000	
	- Honorarium Pembaca Doa	OK	75,000	
	- Honorarium Petugas Pembantu Upacara	OK	50,000	
	- Honorarium Penggerek Bendera	OK	75,000	
	- Honorarium Anggota Korsik	OK	50,000	
	- Honorarium Anggota Paduan Suara	OK	30,000	
	- Honorarium Petugas Perlengkapan	OK	75,000	
	- Honorarium Petugas Gladi Bersih	OK	50,000	
	- Honorarium Petugas Penunggu Tamu	OK	50,000	
	- Honorarium Petugas Kebersihan	OK	50,000	
	- Honorarium Petugas Sound System	OK	150,000	
	- Honorarium Make Up Upacara	OK	50,000	
	- Honorarium Pembaca Pesan-pesan Pahlawan	OK	75,000	
	- Honorarium Pembaca Teks Kongres	OK	75,000	
	- Uang Saku Mantan Pejabat	OK	2,500,000	
	- Uang Saku Anggota DHC dan Veteran	OK	250,000	
	- Honorarium Petugas Obor, Karangan Bunga, Bunga Tabur, Lilin	OK	30,000	
	- Honorarium Guru Pendamping Penunggu Tamu	OK	75,000	
	- Honorarium Perwira Upacara Apel Kehormatan dan Renungan Suci/Upacara Detik	OK	100,000	
	- Honorarium Make Up Barisan Bhineka Tunggal Ika	OK	40,000	
6	Insentif Pendidik dan Pengelola PAUD dan PNF			
	- Insentif Pendidik PAUD (Kober, SPS, TK)	OB	600,000	
	- Insentif Pengelola PAUD (Kober, SPS, TK)	OB	200,000	
	- Insentif Tutor dan Pengelola Paket A,B,C	OB	350,000	
	- Insentif Pengelola TBM	OB	200,000	
	- Insentif tutor dan Pengelola Keaksaraan Fungsional	OB	300,000	
7	Belanja Jasa Kader	/orang/bulan	150,000	
8	Uang Saku Peserta (Non Pegawai/Masyarakat)			
	- Uang Saku Siswa untuk tingkat Provinsi	/orang/hari	100,000	
	- Uang Saku Siswa untuk tingkat Kota	/orang/hari	50,000	
	- Uang Saku Pendamping untuk tingkat Provinsi	/orang/hari	125,000	
	- Uang Saku Pendamping untuk tingkat Kota	/orang/hari	75,000	
9	Honorarium Petugas Bidang Sosial			
	- PKH	orang/triwulan	500,000	
	- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	orang/bulan	200,000	
	- Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	orang/bulan	150,000	
	- Satgas PPA	orang/bulan	200,000	

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 44 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2019

TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2020

Standar Biaya Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Belanja Bahan Pakai Habis			
1.1	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas/			
	a. Minyak Tanah	Liter		
	b. Premium	Liter		
	c. Solar	Liter	berdasarkan	
	d. Pertalite	Liter	harga pasar	
	e. Pertamina	Liter		
1.2	Belanja Pengisian Tabung Gas			
	a. Gas LPJ	kg	berdasarkan	
			harga pasar	
1.3	Belanja Bendera/Umbul-Umbul/ Lajur/ Marawa/ Spanduk/ Papan Informasi			
	Spanduk	permeter	50,000	
1.4	- Seminar Kit	set	20,000	
	- Seminar Kit (pelatihan)	paket	150,000	
1.5	Fotokopi	lembar	200	
1.6	Cetak			
	a. Cetak Naskah Soal	set	2,750	
	b. Cetak LJK	lembar	250	
2.	Belanja Jasa Kantor			
2.1	Belanja Jasa Dokumentasi			
	a. Video			
	- Video Dokumentasi	video	150,000	
	- Video Promosi	video	250,000	
	- Video dengan peralatan khusus	video	350,000	
	b. Foto			
	- ukuran 4R	lembar	2,000	
	- ukuran 5R	lembar	5,000	
	- ukuran 10R	lembar	12,000	
	- ukuran 12R	lembar	15,000	
	- ukuran 20R	lembar	100,000	
	- ukuran 24R	lembar	150,000	
	- ukuran 32R	lembar	200,000	
	c. Iklan	Tayang Maksimum	1,000,000	
2.2	Belanja Jasa Publikasi/ Jumpa Pers			
	a. Media Harian			
	1) Bewarna 1/4 halaman		1,800,000	
	2) Bewarna 1/2 halaman		3,500,000	
	3) Bewarna 1 halaman		7,000,000	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	4) Headline		3,500,000	
	5) Hitam Putih 1/4 halaman		1,500,000	
	6) Hitam Putih 1/2 halaman		3,000,000	
	7) Hitam Putih 1 halaman		6,000,000	
	8) Cover		3,500,000	
	b. Media Mingguan			
	1) Bewarna 1/4 halaman		750,000	
	2) Bewarna 1/2 halaman		1,500,000	
	3) Bewarna 1 halaman		3,000,000	
	4) Headline		1,500,000	
	5) Hitam Putih 1/4 halaman		500,000	
	6) Hitam Putih 1/2 halaman		1,000,000	
	7) Hitam Putih 1 halaman		2,500,000	
	8) Cover		1,500,000	
	c. Media Nasional		Persetujuan Wako	
	d. Biaya Jasa Pemuatan Berita pada media elektronik/website	Judul	30,000	
2.3	Belanja Jasa Transportasi			
	a. Transpor untuk kader/masyarakat	orang/per hari	50,000	
	b. Transportasi Tim Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah/KLB	Per Paket	100,000	
	c. Transportasi pelayanan/petugas kesehatan/Distribusi Obat dan BMHP	orang/per hari	50,000	
	d. Penggantian Transportasi Peliputan Pers			
	1) Jasa Peliputan Pers	Per Kegiatan	20,000	
	e. Penggantian Transportasi Tamu Pers/ Jumpa Pers			
	1) Wartawan Lokal dan Luar Sawahlunto dilaksanakan di luar Sawahlunto	Orang/Kegiatan	100.000,- s/d 500.000,-	
	2) Pimpinan Redaksi Media	Orang/Kegiatan	250.000,- s/d 500.000,-	
	3) Wartawan Lokal Sawahlunto dilaksanakan di Dalam Sawahlunto	Orang/Kegiatan	150,000	
	4) Wartawan Luar Sawahlunto dilaksanakan di Dalam Sawahlunto	Orang/Kegiatan	250.000,- s/d 500.000,-	
	f. Transportasi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, Bayi dan Pendamping	OH	100,000	
	g. Transportasi Rujukan Ibu Hamil, Nifas, Bayi Resti	PP	At Cost	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	h. Biaya Persalinan Normal di Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama, Pustu, Polindes (Petugas harus ada STR)	OK	700,000	
	i. Biaya Perawatan Ibu Hamil Resti, Persalinan, Ibu Nifas dan Bayi Resti di Tingkat Lanjutan	OK	Sesuai Tarif Rumah Sakit	
	j. Transportasi Petugas Registrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa/Kelurahan	OH	50,000	Max 3 hari/bln
	k. Transportasi Pengurus Akta Kematian Melalui Desa/Kelurahan	Per Dokumen	50,000	
3.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			
	3.1 Belanja Service	Perkendaraan/ Tahun		
	a. Roda 2		600,000	
	b. Roda 4		1,200,000	
	c. Roda 6		3,000,000	
	3.2 Belanja Penggantian Suku Cadang	Perkendaraan/ Tahun		
	a. Roda 2		1,620,000	
	b. Roda 4		4,320,000	
	c. Roda 6		15,120,000	
	3.3 Belanja BBM Kendaraan Dinas	Perkendaraan/ Tahun		
	a. Roda 2		2,000,000	
	b. Roda 4		6,000,000	
	3.4 Belanja Jasa Kir/SWDLAJ dan Administrasi STNK	Perkendaraan/ Tahun	Sesuai tarif berlaku	
	3.5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan/Pajak Kendaraan Bermotor		Sesuai tarif berlaku	
4.	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir/ Tanah		Berdasarkan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha	
	4.1 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah			
	4.2 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Gudang/ Tanah/ Aula/ Penginapan/ Ruang Belajar			
5.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			
	5.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			
	a. Belanja Sewa Kendaraan Dinas/ Bus Pemd		Berdasarkan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
6.	Belanja Sewa Alat Berat		Berdasarkan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha	
	a. Pemakaian Alat Berat dan sejenisnya			
7.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		Berdasarkan Perda tentang Retribusi Jasa Usaha	
	a. Belanja Sewa Meja Kursi			
	b. Belanja Sewa Komputer dan Printer			
	c. Belanja Sewa Proyektor			
	d. Belanja Sewa Generator			
	e. Belanja Sewa Tenda			
	f. Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional			
	g. Belanja Sewa Perlengkapan Praktek			
	h. Belanja Sewa Sound System/Alat Musik			
	i. Belanja Sewa Bunga / Taman			
	j. Belanja Sewa Alat Hiburan			
8.	Belanja Makanan dan Minuman			
	8.1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
	a. Nasi Kotak	Perporsi	22,000	
	b. Nasi Bungkus	Perporsi	18,000	
	c. Snack VIP	Perporsi	10,000	
	d. Snack	Perporsi	6,500	
	e. Snack Rapat malam	Perporsi	17,500	
	8.2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu			
	a. Hidangan Prasmanan Acara Khusus/ Nasional dan Internasional (Max)	Perporsi	Persetujuan KDH	
	b. Hidangan Prasmanan VVIP	Perporsi	30,000	
	c. Hidangan Prasmanan	Perporsi	27,500	
	d. Nasi Kotak VVIP	Perporsi	27,500	
	e. Sarapan Pagi	Perporsi	10,000	
	f. Snack VIP	Perporsi	10,000	
	8.3 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/ Pelatihan			
	a. Nasi Kotak	Perporsi	22,000	
	b. Nasi Bungkus	Perporsi	18,000	
	c. Snack	Perporsi	6,500	
	8.4 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Event Tour de Singkarak			
	a. Makan Siang Atlit/ Official (Makanan Internasional)	Perporsi	200,000	
	b. Makan Malam VIP Undangan Lainnya (Makanan Nasional)	Perporsi	50,000	
	c. Snack Atlit/VIP	Perporsi	20,000	
	d. Fruit Basket Atlit	Perporsi	150,000	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
9.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya			
9.1	Belanja pakaian Dinas Sipil Harian (PSH) termasuk upah	per orang	250,000	
9.2	Belanja pakaian Dinas Sipil Lengkap (PSL) termasuk upah	per orang	1,500,000	
9.3	Belanja Pakaian Dinas Protokoler/Upacara termasuk upah	per orang	500,000	
9.4	Belanja Kelengkapan dan Atribut Satpol PP dan Pemadam Kebakaran			
	- Sepatu PDL Satpol PP	pasang	600,000	
	- Sepatu PDL Damkar	pasang	1,500,000	
	- Sepatu PDH	pasang	400,000	
	- Baju Kaos Pendek	Lembar	100,000	
	- Baju Kaos Panjang	Lembar	125,000	
	- Lambang Kewenangan	Bh	75,000	
	- Lambang Monogrom	Pasang	40,000	
	- Pangkat PDH	Pasang	130,000	
	- Baret dan Emblen	Bh	100,000	
	- Topi Pet PDH	Bh	85,000	
	- Pluit + Talikur	Bh	30,000	
	- Dahrin	Bh	100,000	
	- Kaos Kaki PDL	Bh	35,000	
	- Training Lengkap	Lembar	200,000	
	- Topi Rimba	Bh	75,000	
	- Kopel	Bh	85,000	
10.	Belanja Pakaian Kerja			
10.1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan			
	a. Pakaian Lapangan dan Sepatu Boot K3	per orang	300,000	
	b. Pakaian Cleaning Service	per orang	200,000	
	c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	per orang	1,045,000	
	d. Pakaian Dinas Harian (PDH)	per orang	1,090,000	
	e. Pakaian Dinas Upacara (PDU)	per orang	1,750,000	Satpol Pemadam
10.2	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu			
	Belanja Pakaian Batik/Tradisional			
	a. Pakaian Tenun Silungkang (standar benang 2)	per orang	350,000	
10.3	Belanja Pakaian Dinas khusus untuk Pimpinan dan Anggota DPRD			
	a. PSH	stel	1,750,000	
	b. PSL/JAS	stel	3,500,000	
	c. PDH - Lengan Panjang	stel	1,500,000	
	d. PSR/Safari	stel	2,500,000	
10.4	Belanja Pakaian Kegiatan			
	a. Pakaian seragam Kontingen/kafilah	/helai	150,000	
	b. Pakaian seragam guru pendamping Kontingen/kafilah	/helai	200,000	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	c. Pakaian peserta kegiatan (Kaos)	/helai	80,000	
	d. Pakaian peserta kegiatan (Kaos kerah)	/helai	100,000	
11.	Belanja Perjalanan Dinas	berdasarkan ketentuan berlaku		
	11.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
	11.2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			
	11.3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri			
	11.4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			
	a. Belanja Perjalanan Tetap dalam Kota			
	1) Petugas mengantarkan Surat/Caraka (maksimal 1 orang per SKPD)	orang/bulan	300,000	
	2) Penyuluh	orang/bulan	350,000	
	3) Sopir Ambulan / Petugas Rujukan dalam kota	orang/bulan	250,000	
	b. Perjalanan Dinas Tetap Pengawas			
	1) Fungsional (Diknas)	orang/bulan	200,000	
12.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Per PNS / Sampai Tamat	Berdasarkan Persetujuan Walikota	
	12.1 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3 (Diploma)	Per PNS / Sampai Tamat	Berdasarkan Surat PT	
	a. Bantuan SPP Program D3	Perorang/Tamat		
	12.2 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	Per PNS / Sampai Tamat	Berdasarkan Surat PT	
	a. Bantuan SPP Program S1	Perorang/Tamat		
	b. Biaya Bantuan Wisuda	Perorang/Tamat		
	12.3 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2/ Dokter Spesialis (PNS)	Per PNS / Sampai Tamat	Berdasarkan Surat PTN	
	a. Bantuan SPP Program S2	Perorang/Tamat		
	b. Bantuan Materikulasi			
	c. Biaya Bantuan Wisuda	Perorang/Tamat		
	12.4 Bantuan Biaya Pendidikan Dokter Spesialis	Pertahun/ per orang	Maksimal Rp. 40.000.000	
	12.5 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3		Berdasarkan Persetujuan Walikota	
13.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pegawai Negeri Sipil			
	13.1 Belanja Kursus-Kursus Singkat /			

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	a. Kursus Jobtraining	perorang	Berdasarkan Surat Undangan/ Pemanggilan	
	13.2 Bantuan Uang Saku Diklat Teknis/ Fungsional PNS	orang/perhari	Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas	
	13.3 Belanja Sosialisasi		Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas	
	Mengikuti Sosialisasi	perorang		
	13.4 Pengembangan Termasuk Analisa, Telaahan, Sosialisasi, Seminar, Konsinyasi, Desiminasi dan lain-lain	orang/perhari	Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas	
	13.5 Belanja Bimbingan Teknis Setoran Maksimum (Perorang / disesuaikan undangan)		Berdasarkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas	
	13.6 Belanja Diklat PIM			
	Diklat Pimpinan / Struktural		Sesuai Standar Diklat dan Persetujuan Walikota	
	a. Diklat Pimpinan Tk. I	perorang		
	b. Diklat Pimpinan Tk. II	perorang		
	c. Diklat Pimpinan Tk. III	perorang		
	d. Diklat Pimpinan Tk. IV	perorang		
14.	Biaya Penunjang Paket Pekerjaan Fisik (ATK, Fotokopi, Jilid, BBM dan Makan Minum)			
	- Paket Pekerjaan Rp.1,- s/d Rp. 150.000.000,-	per paket	500,000	
	- Paket Pekerjaan diatas Rp.150.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-	per paket	600,000	
	- Paket Pekerjaan diatas Rp.200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	per paket	700,000	
	- Paket Pekerjaan diatas Rp.500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-	per paket	1,200,000	
	- Paket Pekerjaan diatas Rp.1.000.000.000,- s/d Rp. 3.000.000.000,-	per paket	1,300,000	
	- Paket Pekerjaan diatas Rp.3.000.000.000,-	per paket	1,400,000	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
15	Biaya Jasa Pemandu			
	- Moderator Kegiatan Tingkat Nasional	/kegiatan	250,000	
	- Moderator Kegiatan Tingkat Provinsi	/kegiatan	200,000	
	- Moderator Kegiatan Tingkat Kota	/kegiatan	150,000	
	- MC/Pembawa Acara Kegiatan Tingkat Nasional	/kegiatan	250,000	
	- MC/Pembawa Acara Kegiatan Tingkat Provinsi	/kegiatan	200,000	
	- MC/Pembawa Acara Kegiatan Tingkat Kota	/kegiatan	150,000	
	- MC/Pembawa Acara Event Khusus	/kegiatan	500,000	
	- Pemandu Lagu	/kegiatan	100,000	
	- Pemandu Doa/Rohaniawan	/kegiatan	100,000	
	- Pemandu Sound System	/kegiatan	150,000	
	- Pembaca Naskah	/kegiatan	100,000	
16	Biaya Jasa Angkut, kebersihan Acara	OH	50,000	
17	Biaya Jasa Penampilan Seni			
	- Penampilan Tari dengan musik live	orang/kegiatan	250,000	
	- Penampilan Tari dengan musik rekaman	orang/kegiatan	175,000	
	- Penampilan Kesenian HAN	orang/kegiatan	50,000	
18	Biaya Jasa Pertunjukan Seni			
	- Penampilan Wayang Luar Prov. Sumbar	per penampilan	14,600,000	Maksimal
	- Penampilan Wayang Luar Kota Sawahlunto	per penampilan	9,750,000	Maksimal
	- Penampilan Wayang Dalam Kota Sawahlunto	per penampilan	6,800,000	Maksimal
	- Penampilan Hiburan Kesenian Dalam Kota	per penampilan	2,000,000	Maksimal
	- Penampilan Hiburan Kesenian Luar Kota	per penampilan	2,350,000	Maksimal
19	Belanja Bahan Penghargaan/Hadiah/Reward Merchandise			
	- Merchandise Biasa	/paket	300,000	
	- Merchandise Utama	/paket	700,000	
	- Merchandise	/paket	60,000	
20	Belanja Motivasi/Penghargaan			
	a. Tingkat Nasional			
	- Perorangan			
	Juara I	/orang	4,000,000	
	Juara II	/orang	3,500,000	
	Juara III	/orang	3,000,000	
	Juara Harapan	/orang	2,500,000	
	- Kelompok			
	Juara I	/kelompok	5,000,000	
	Juara II	/kelompok	4,500,000	
	Juara III	/kelompok	4,000,000	
	Juara Harapan	/kelompok	3,500,000	
	b. Tingkat Provinsi			
	- Perorangan			
	Juara I	/orang	3,000,000	
	Juara II	/orang	2,500,000	
	Juara III	/orang	2,000,000	
	Juara Harapan	/orang	1,500,000	

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
	b. Tingkat Provinsi			
	- Perorangan			
	Juara I	/orang	3,000,000	
	Juara II	/orang	2,500,000	
	Juara III	/orang	2,000,000	
	Juara Harapan	/orang	1,500,000	
	- Kelompok			
	Juara I	/kelompok	4,000,000	
	Juara II	/kelompok	3,500,000	
	Juara III	/kelompok	3,000,000	
	Juara Harapan	/kelompok	2,500,000	
	c. Tingkat Kota			
	- Perorangan			
	Juara I	/orang	2,000,000	
	Juara II	/orang	1,500,000	
	Juara III	/orang	1,000,000	
	Juara Harapan	/orang	800,000	
	- Kelompok			
	Juara I	/kelompok	1,500,000	
	Juara II	/kelompok	2,500,000	
	Juara III	/kelompok	2,000,000	
	Juara Harapan	/kelompok	1,000,000	
	d. Tingkat Kecamatan			
	- Perorangan			
	Juara I	/orang	1,000,000	
	Juara II	/orang	800,000	
	Juara III	/orang	600,000	
	Juara Harapan	/orang	400,000	
	- Kelompok			
	Juara I	/kelompok	2,000,000	
	Juara II	/kelompok	1,500,000	
	Juara III	/kelompok	1,000,000	
	Juara Harapan	/kelompok	800,000	
	e. Tingkat Kelurahan			
	- Perorangan			
	Juara I	/orang	500,000	
	Juara II	/orang	450,000	
	Juara III	/orang	400,000	
	Juara Harapan	/orang	300,000	
	- Kelompok			
	Juara I	/kelompok	1,000,000	
	Juara II	/kelompok	800,000	
	Juara III	/kelompok	600,000	
	Juara Harapan	/kelompok	400,000	
	f. Motivasi Pemilihan Duta Wisata			
	- Uda/Uni Juara I	/orang/kegiatan	2,500,000	
	- Uda/Uni Wakil I	/orang/kegiatan	2,000,000	
	- Uda/Uni Wakil II	/orang/kegiatan	1,500,000	
	- Uda/Uni Persahabatan	/orang/kegiatan	1,000,000	
	- Uda/Uni Intelegensia	/orang/kegiatan	1,000,000	
	- Uda/Uni Berbakat	/orang/kegiatan	1,000,000	
	- Uda/Uni Favorit	/orang/kegiatan	1,000,000	

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 44 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2019

TENTANG : STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN APBD

KODE REKENING	URAIAN REKENING
4	PENDAPATAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah
4.1.1.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4.1.1.01.01	PKB - Mobil Penumpang - Sedan
4.1.1.01.02	PKB - Mobil Penumpang - Jeep
4.1.1.01.03	PKB - Mobil Penumpang - Minibus
4.1.1.01.04	PKB - Mobil Bus - Microbus
4.1.1.01.05	PKB - Mobil Bus - Bus
4.1.1.01.06	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up
4.1.1.01.07	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck
4.1.1.01.08	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck
4.1.1.01.09	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2
4.1.1.01.10	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3
4.1.1.01.11	PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4.1.1.01.12	Dst.....
4.1.1.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4.1.1.02.01	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan
4.1.1.02.02	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep
4.1.1.02.03	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus
4.1.1.02.04	BBNKB -Mobil Bus - Microbus
4.1.1.02.05	BBNKB -Mobil Bus - Bus
4.1.1.02.06	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up
4.1.1.02.07	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck
4.1.1.02.08	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck
4.1.1.02.09	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2
4.1.1.02.10	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3
4.1.1.02.11	BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4.1.1.02.12	Dst.....
4.1.1.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.1.1.03.01	Pajak Bahan Bakar Premium
4.1.1.03.02	Pajak Bahan Bakar Pertamina
4.1.1.03.03	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus
4.1.1.03.04	Pajak Bahan Bakar Solar
4.1.1.03.05	Pajak Bahan Bakar Gas
4.1.1.03.06	Dst
4.1.1.04	Pajak Air Permukaan
4.1.1.04.01	Pajak Air Permukaan
4.1.1.05	Pajak Rokok
4.1.1.05.01	Pajak Rokok
4.1.1.06	Pajak Hotel
4.1.1.06.01	Hotel
4.1.1.06.02	Motel
4.1.1.06.03	Losmen
4.1.1.06.04	Gubuk Pariwisata
4.1.1.06.05	Wisma Pariwisata
4.1.1.06.06	Pesanggrahan
4.1.1.06.07	Rumah Penginapan dan sejenisnya
4.1.1.06.08	Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)
4.1.1.06.09	Dst
4.1.1.07	Pajak Restoran
4.1.1.07.01	Restoran
4.1.1.07.02	Rumah Makan

4.1.1.07.03	Kafetaria
4.1.1.07.04	Kantin
4.1.1.07.05	Warung
4.1.1.07.06	Bar
4.1.1.07.07	Jasa Boga/ Katering
4.1.1.07.08	Makan Minum Pada Kegiatan SKPD
4.1.1.08	Pajak Hiburan
4.1.1.08.01	Tontonan Film/Bioskop
4.1.1.08.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
4.1.1.08.03	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya
4.1.1.08.04	Pameran
4.1.1.08.05	Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya
4.1.1.08.06	Sirkus/Akrobat/Sulap
4.1.1.08.07	Permainan Bilyar, Golf, Bowling
4.1.1.08.08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan
4.1.1.08.09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center)
4.1.1.08.10	Pertandingan Olahraga
4.1.1.08.11	PT. WWS
4.1.1.09	Pajak Reklame
4.1.1.09.01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
4.1.1.09.02	Reklame Kain
4.1.1.09.03	Reklame Melekat/Stiker
4.1.1.09.04	Reklame Selebaran
4.1.1.09.05	Reklame Berjalan
4.1.1.09.06	Reklame Udara
4.1.1.09.07	Reklame Apung
4.1.1.09.08	Reklame Suara
4.1.1.09.09	Reklame Film/Slide
4.1.1.09.10	Reklame Peragaan
4.1.1.09.11	Dst
4.1.1.10	Pajak Penerangan Jalan
4.1.1.10.01	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri
4.1.1.10.02	Pajak Penerangan Jalan sumber lain
4.1.1.11	Pajak Parkir
4.1.1.11.01	Pajak Parkir
4.1.1.12	Pajak Air Tanah
4.1.1.12.01	Pajak Air Tanah
4.1.1.13	Pajak Sarang Burung Walet
4.1.1.13.01	Pajak Sarang Burung Walet,
4.1.1.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.1.1.14.01	Asbes
4.1.1.14.02	Batu Tulis
4.1.1.14.03	Batu setengah permata
4.1.1.14.04	Batu Kapur
4.1.1.14.05	Batu Apung
4.1.1.14.06	Batu Permata
4.1.1.14.07	Bentonit
4.1.1.14.08	Dolomit
4.1.1.14.09	Feldspar
4.1.1.14.10	Garam Batu (Halite)
4.1.1.14.11	Grafit
4.1.1.14.12	Granit/Andesit
4.1.1.14.13	Gips
4.1.1.14.14	Kalsit
4.1.1.14.15	Kaolin
4.1.1.14.16	Leusit
4.1.1.14.17	Magnesit
4.1.1.14.18	Mika
4.1.1.14.19	Marmer
4.1.1.14.20	Nitrat
4.1.1.14.21	Opsidien
4.1.1.14.22	Oker
4.1.1.14.23	Pasir dan kerikil
4.1.1.14.24	Pasir Kuarsa
4.1.1.14.25	Perlit

4.1.1.14.26	Phospat
4.1.1.14.27	Talk
4.1.1.14.28	Tanah Serap (Fullers earth)
4.1.1.14.29	Tanah Diatome
4.1.1.14.30	Tanah Liat
4.1.1.14.31	Tawas (Alum)
4.1.1.14.32	Tras
4.1.1.14.33	Yarosif
4.1.1.14.34	Zeolit
4.1.1.14.35	Basal
4.1.1.14.36	Trakit
4.1.1.14.37	Mineral bukan logam dan lainnya
4.1.1.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
4.1.1.15.01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
4.1.1.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4.1.1.16.01	BPHTB - Pemindahan Hak
4.1.1.16.02	BPHTB - Pemberian Hak Baru
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah
4.1.2.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan
4.1.2.01.01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas
4.1.2.01.02	Puskesmas keliling
4.1.2.01.03	Puskesmas pembantu
4.1.2.01.04	Balai Pengobatan
4.1.2.01.05	Rumah Sakit Umum Daerah
4.1.2.01.06	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pmda
4.1.2.01.07	Iuran Premi Jaminan Kesehatan
4.1.2.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
4.1.2.02.01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara
4.1.2.02.02	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah
4.1.2.02.03	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah
4.1.2.03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4.1.2.03.01	Kartu Tanda Penduduk
4.1.2.03.02	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal
4.1.2.03.03	Kartu Identitas Kerja
4.1.2.03.04	Kartu Penduduk Sementara
4.1.2.03.05	Kartu Identitas Penduduk Musiman
4.1.2.03.06	Kartu Keluarga
4.1.2.03.07	Akta Catatan Sipil
4.1.2.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4.1.2.04.01	Pelayanan Penguburan/Pemakaman
4.1.2.04.02	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
4.1.2.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4.1.2.05.01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4.1.2.06	Retribusi Pelayanan Pasar
4.1.2.06.01	Pelataran
4.1.2.06.02	Los
4.1.2.06.03	Kios
4.1.2.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4.1.2.07.01	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan
4.1.2.07.02	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep
4.1.2.07.03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus
4.1.2.07.04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus
4.1.2.07.05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus
4.1.2.07.06	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up
4.1.2.07.07	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck
4.1.2.07.08	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck
4.1.2.07.09	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2
4.1.2.07.10	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3
4.1.2.07.11	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4.1.2.07.12	Dst.....

4.1.2.08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4.1.2.08.01	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
4.1.2.08.02	Alat Penanggulangan Kebakaran
4.1.2.08.03	Alat Penyelamatan Jiwa
4.1.2.08.04	Dst.....
4.1.2.09	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4.1.2.09.01	Penyediaan Peta Dasar (Garis)
4.1.2.09.02	Penyediaan Peta Foto
4.1.2.09.03	Penyediaan Peta Digital
4.1.2.09.04	Penyediaan Peta Tematik
4.1.2.09.05	Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
4.1.2.10	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4.1.2.10.01	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4.1.2.11	Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4.1.2.11.01	Rumah Tangga
4.1.2.11.02	Perkantoran
4.1.2.11.03	Industri
4.1.2.12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4.1.2.12.01	Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya
4.1.2.12.02	Pengujian dalam keadaan terbungkus
4.1.2.13	Retribusi Pelayanan Pendidikan
4.1.2.13.01	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan
4.1.2.13.02	Pelatihan Teknis
4.1.2.14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4.1.2.14.01	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi
4.1.2.15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.1.2.15.01	Penyewaan Tanah dan Bangunan
4.1.2.15.02	Laboratorium
4.1.2.15.03	Ruangan -LRA
4.1.2.15.04	Kendaraan Bermotor
4.1.2.15.05	Alat Berat
4.1.2.15.06	Peralatan
4.1.2.15.07	Radio Pemerintah Kota Sawahlunto
4.1.2.16	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
4.1.2.16.01	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang
4.1.2.16.02	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
4.1.2.16.03	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
4.1.2.17	Retribusi Tempat Pelelangan
4.1.2.17.01	Pelelangan Ikan
4.1.2.17.02	Pelelangan Ternak
4.1.2.17.03	Pelelangan Hasil Bumi
4.1.2.17.04	Pelelangan Hasil Hutan
4.1.2.17.05	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan
4.1.2.18	Retribusi Terminal
4.1.2.18.01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum
4.1.2.18.02	Tempat Kegiatan Usaha
4.1.2.18.03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
4.1.2.19	Retribusi Tempat Khusus Parkir
4.1.2.19.01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir
4.1.2.20	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
4.1.2.20.01	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
4.1.2.21	Retribusi Rumah Potong Hewan
4.1.2.21.01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong
4.1.2.21.02	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong
4.1.2.21.03	Pelayanan Rumah Potong Hewan
4.1.2.22	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

4 . 1 . 2 . 22 . 01	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan
4 . 1 . 2 . 23	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
4 . 1 . 2 . 23 . 01	Pelayanan Tempat Rekreasi
4 . 1 . 2 . 23 . 02	Pelayanan Tempat Pariwisata
4 . 1 . 2 . 23 . 03	Pelayanan Tempat Olahraga
4 . 1 . 2 . 24	Retribusi Penyeberangan Air
4 . 1 . 2 . 24 . 01	Pelayanan Penyeberangan Orang
4 . 1 . 2 . 24 . 02	Pelayanan Penyeberangan Barang
4 . 1 . 2 . 25	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4 . 1 . 2 . 25 . 01	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah
4 . 1 . 2 . 26	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4 . 1 . 2 . 26 . 01	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
4 . 1 . 2 . 27	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4 . 1 . 2 . 27 . 01	Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4 . 1 . 2 . 28	Retribusi Izin Gangguan
4 . 1 . 2 . 28 . 01	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi
4 . 1 . 2 . 28 . 02	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan
4 . 1 . 2 . 29	Retribusi Izin Trayek
4 . 1 . 2 . 29 . 01	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi
4 . 1 . 2 . 29 . 02	Pemberian Izin Trayek kepada Badan
4 . 1 . 2 . 30	Retribusi Izin Perikanan
4 . 1 . 2 . 30 . 01	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi
4 . 1 . 2 . 30 . 02	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan
4 . 1 . 2 . 31	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
4 . 1 . 2 . 31 . 01	Penggunaan ruas jalan tertentu
4 . 1 . 2 . 31 . 02	Penggunaan koridor tertentu -LRA
4 . 1 . 2 . 31 . 03	Penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang
4 . 1 . 2 . 32	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
4 . 1 . 2 . 32 . 01	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4 . 1 . 3 . 01 . 01	Deviden Bank Nagari
4 . 1 . 3 . 01 . 02	Deviden BPR
4 . 1 . 3 . 01 . 03	Bagian Laba PT. WWS
4 . 1 . 3 . 01 . 04	Bagian Laba Hotel Parai
4 . 1 . 3 . 02	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN
4 . 1 . 3 . 02 . 01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMN
4 . 1 . 3 . 02 . 02	Dst
4 . 1 . 3 . 03	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
4 . 1 . 3 . 03 . 01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
4 . 1 . 3 . 03 . 02	Dst
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah
4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
4 . 1 . 4 . 01 . 01	Hasil Penjualan Tanah
4 . 1 . 4 . 01 . 02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
4 . 1 . 4 . 01 . 03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
4 . 1 . 4 . 01 . 04	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan
4 . 1 . 4 . 01 . 05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
4 . 1 . 4 . 01 . 06	Hasil Penjualan Pertanian / Peternakan

4.1.4.02	Hasil Penjualan Aset Lainnya
4.1.4.02.01	Hasil Penjualan Aset Lainnya
4.1.4.03	Penerimaan Jasa Giro
4.1.4.03.01	Jasa Giro Kas Daerah
4.1.4.03.02	Jasa Giro Bendahara
4.1.4.03.03	Jasa Giro Dana Cadangan
4.1.4.03.04	Dst
4.1.4.04	Pendapatan Bunga
4.1.4.04.01	Pendapatan Bunga Deposito.....
4.1.4.04.02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir
4.1.4.04.03	Dst
4.1.4.05	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
4.1.4.05.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
4.1.4.05.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
4.1.4.06	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4.1.4.06.01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah
4.1.4.06.02	Penerimaan Potongan dari
4.1.4.06.03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari
4.1.4.06.04	Dst
4.1.4.07	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.4.07.02	Dst
4.1.4.08	Pendapatan Denda Pajak
4.1.4.08.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
4.1.4.08.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.1.4.08.03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.1.4.08.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
4.1.4.08.05	Pendapatan Denda Pajak Rokok
4.1.4.08.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel
4.1.4.08.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran
4.1.4.08.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4.1.4.08.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame
4.1.4.08.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4.1.4.08.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir
4.1.4.08.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
4.1.4.08.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4.1.4.08.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.1.4.08.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
4.1.4.08.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4.1.4.09	Pendapatan Denda Retribusi
4.1.4.09.01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan
4.1.4.09.02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
4.1.4.09.03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4.1.4.09.04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
4.1.4.09.05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4.1.4.09.06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar
4.1.4.09.07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4.1.4.09.08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4.1.4.09.09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4.1.4.09.10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4.1.4.09.11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4.1.4.09.12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4.1.4.09.13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan
4.1.4.09.14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4.1.4.09.15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4.1.4.09.16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
4.1.4.09.17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan
4.1.4.09.18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal
4.1.4.09.19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir
4.1.4.09.20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
4.1.4.09.21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan

4.1.4.09.22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4.1.4.09.23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
4.1.4.09.24	Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air
4.1.4.09.25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4.1.4.09.26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4.1.4.09.27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4.1.4.09.28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan
4.1.4.09.29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek
4.1.4.09.30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan
4.1.4.09.31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
4.1.4.09.32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
4.1.4.10	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah
4.1.4.10.01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah
4.1.4.10.02	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah
4.1.4.10.03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah
4.1.4.10.04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna
4.1.4.11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda
4.1.4.11.01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda
4.1.4.11.02	Dst
4.1.4.12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4.1.4.12.01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
4.1.4.12.02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame
4.1.4.12.03	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.4.12.04	Hasil Eksekusi Atas Pelanggaran Perda
4.1.4.13	Pendapatan dari Pengembalian
4.1.4.13.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21
4.1.4.13.02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan
4.1.4.13.03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4.1.4.13.04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4.1.4.13.05	Pendapatan Dari Pengembalian Uang Muka
4.1.4.13.06	Pendapatan Dari Pengembalian TASPEN
4.1.4.14	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat
4.1.4.14.01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah
4.1.4.14.02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat
4.1.4.14.03	Dst
4.1.4.15	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
4.1.4.15.01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III
4.1.4.15.02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
4.1.4.15.03	Dst
4.1.4.16	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
4.1.4.16.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa
4.1.4.16.02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan
4.1.4.16.03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah
4.1.4.16.04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna
4.1.4.17	Pendapatan Zakat*
4.1.4.17.01	Pendapatan Zakat*
4.1.4.18	Pendapatan BLUD
4.1.4.18.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD
4.1.4.18.02	Pendapatan Hibah BLUD
4.1.4.18.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD
4.1.4.18.04	Dst
4.1.4.19	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP
4.1.4.19.01	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Talawi
4.1.4.19.02	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kolok
4.1.4.19.03	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sungai Durian
4.1.4.19.04	Dana Kapitasi JKN FKTP Kampung Teleng
4.1.4.19.05	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Lunto
4.1.4.19.06	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Silungkang
4.1.4.20	Dana Kapitasi JPKM
4.1.4.20.01	Dana Kapitasi JPKM Puskesmas Talawi

4.1.4.20.02	Dana Kapitasi JPKM Puskesmas Kolok
4.1.4.20.03	Dana Kapitasi JPKM Puskesmas Sungai Durian
4.1.4.20.04	Dana Kapitasi JPKM Kampung Teleng
4.1.4.20.05	Dana Kapitasi JPKM Puskesmas Lunto
4.1.4.20.06	Dana Kapitasi JPKM Puskesmas Silungkang
4.1.4.21	Dana Iuran Premi JPKM
4.1.4.21.01	Dana Iuran Premi JPKM Puskesmas Talawi
4.1.4.21.02	Dana Iuran Premi JPKM Puskesmas Kolok
4.1.4.21.03	Dana Iuran Premi JPKM Puskesmas Sungai Durian
4.1.4.21.04	Dana Iuran Premi JPKM Kampung Teleng
4.1.4.21.05	Dana Iuran Premi JPKM Puskesmas Lunto
4.1.4.21.06	Dana Iuran Premi JPKM Puskesmas Silungkang
4.2	DANA PERIMBANGAN
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan
4.2.1.01.02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan
4.2.1.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21
4.2.1.01.05	Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau
4.2.1.01.06	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Pusat
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4.2.1.02.01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
4.2.1.02.03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
4.2.1.02.04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)
4.2.1.02.05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4.2.1.02.06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
4.2.1.02.10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
4.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum
4.2.2.01.02	Dana Alokasi Umum Tambahan
4.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus Fisik
4.2.3.01.01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan
4.2.3.01.02	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
4.2.3.01.03	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum
4.2.3.01.04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi
4.2.3.01.05	DAK Bidang Keluarga Berencana
4.2.3.01.06	DAK Bidang Kehutanan
4.2.3.01.07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4.2.3.01.08	DAK Bidang Kesehatan
4.2.3.01.09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan
4.2.3.01.10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan
4.2.3.01.11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan
4.2.3.01.12	DAK Bidang Perdagangan
4.2.3.01.13	DAK Bidang Lingkungan Hidup
4.2.3.01.14	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT)
4.2.3.01.15	DAK Bidang Pertanian
4.2.3.01.16	DAK Bidang Energi Pedesaan
4.2.3.01.17	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan
4.2.3.01.18	DAK Bidang Pendidikan
4.2.3.01.19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat
4.2.3.01.20	DAK Bidang Infrastruktur Publik Daerah
4.2.3.01.21	DAK Bidang Jalan Pendukung Konektivitas
4.2.3.01.22	DAK Bidang Irigasi Pendukung Kedaulatan Pangan
4.2.3.01.23	DAK Bidang Pariwisata
4.2.3.01.24	DAK Bidang Perpustakaan Daerah

4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus Non Fisik
4.2.3.02.01	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Sekolah
4.2.3.02.02	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Penyelenggara PAUD
4.2.3.02.03	DAK Non Fisik - Tunjangan Profesi Guru
4.2.3.02.04	DAK Non Fisik - Tambahan Penghasilan Guru
4.2.3.02.05	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Kesehatan
4.2.3.02.06	DAK Non Fisik - Akreditasi Rumah Sakit
4.2.3.02.07	DAK Non Fisik - Akreditasi Puskesmas
4.2.3.02.08	DAK Non Fisik - Jaminan Persalinan
4.2.3.02.09	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional KB
4.2.3.02.10	DAK Non Fisik - Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi dan UKM
4.2.3.02.11	DAK Non Fisik - Dana Peningkatan Pengelolaan Ketenagakerjaan
4.2.3.02.12	DAK Non Fisik - Tunjangan Khusus Guru
4.2.3.02.13	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Administrasi Penduduk
4.2.3.02.14	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Kepariwisata
4.2.3.02.15	DAK Non Fisik - Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM
4.2.3.02.16	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum
4.2.3.02.17	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan
4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus Penugasan
4.2.3.03.01	DAK Penugasan Bidang Air Minum
4.2.3.03.02	DAK Penugasan Bidang Irigasi Pendukung Kedaulatan Pangan
4.2.3.03.03	DAK Penugasan Bidang Penurunan Stunting
4.2.3.03.04	DAK Penugasan Bidang Pengendalian Penyakit
4.2.3.03.05	DAK Penugasan Bidang Pasar
4.2.3.03.06	DAK Penugasan Bidang Irigasi
4.2.3.03.07	DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup
4.2.4	Dana Alokasi Desa
4.2.4.01	Dana Alokasi Desa.
4.2.4.01.01	Dana Alokasi Desa..
4.2.5	Dana Insentif Daerah (DID)
4.2.5.01	Dana Insentif Daerah (DID)
4.2.5.01.01	Dana Insentif Daerah (DID)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.3.1	Pendapatan Hibah
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4.3.1.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4.3.1.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri
4.3.1.03.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri
4.3.1.03.02	Dst
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan
4.3.1.04.01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat
4.3.1.04.02	Pendapatan Hibah dari perorangan
4.3.1.05	Pendapatan Hibah Dana BOS
4.3.1.05.01	Pendapatan Hibah Dana BOS
4.3.2	Dana Darurat
4.3.2.01	Dana Darurat
4.3.2.01.01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4.3.2.01.02	Dst
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4.3.3.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi ...
4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten ...

4.3.3.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
4.3.3.03.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota ...
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4.3.4.01	Dana Penyesuaian
4.3.4.01.01	Tunjangan Profesi Guru PNSD
4.3.4.01.02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah
4.3.4.01.04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi
4.3.4.01.05	Bantuan Operasional Sekolah ***
4.3.4.01.06	Dst
4.3.4.02	Dana Otonomi Khusus
4.3.4.02.01	Dana Otonomi Khusus
4.3.4.02.02	Dana Tambahan Infrastruktur
4.3.4.03	Dana Keistimewaan
4.3.4.03.01	Dana Keistimewaan **
4.3.5	Bantuan Keuangan
4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi
4.3.5.01.02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
4.3.5.01.03	Dst
4.3.5.02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten
4.3.5.02.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten
4.3.5.02.02	Dst
4.3.5.03	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota
4.3.5.03.01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota
4.3.5.03.02	Dst
4.3.6	Pendapatan Lainnya
4.3.6.01	Pendapatan Lainnya
4.3.6.01.01	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga
4.3.6.01.02	Dst
4.3.7	Dana Alokasi Desa
4.3.7.01	Dana Alokasi Desa
4.3.7.01.01	Dana Alokasi Desa
5	BELANJA
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1	Belanja Pegawai
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan
5.1.1.01.10	Uang Paket
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian
5.1.1.01.19	Dana Operasional Pimpinan DPRD

5.1.1.01.20	Tunjangan Kesehatan DPRD
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan prestasi kerja (termasuk sertifikasi)
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Guru (Non Sertifikasi)
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
5.1.1.03.01	Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5.1.1.03.03	Belanja Penunjang Transportasi
5.1.1.03.04	Belanja Penunjang Reses
5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.04.01	Biaya Pemungutan PBB
5.1.1.04.02	Biaya Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.04.03	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan
5.1.1.04.04	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan
5.1.1.04.05	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan
5.1.1.04.06	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor
5.1.1.05.02	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5.1.1.05.03	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5.1.1.05.04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan
5.1.1.05.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok
5.1.1.05.06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel
5.1.1.05.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran
5.1.1.05.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan
5.1.1.05.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame
5.1.1.05.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan
5.1.1.05.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir
5.1.1.05.12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah
5.1.1.05.13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet
5.1.1.05.14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5.1.1.05.15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
5.1.1.05.17	Biaya Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan
5.1.1.06.02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
5.1.1.06.04	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5.1.1.06.05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar
5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor
5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
5.1.1.06.09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta
5.1.1.06.10	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
5.1.1.06.11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair
5.1.1.06.12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang
5.1.1.06.13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan
5.1.1.06.14	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi
5.1.1.06.15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah
5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan
5.1.1.06.17	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan
5.1.1.06.18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal
5.1.1.06.19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir
5.1.1.06.20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
5.1.1.06.21	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan
5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan
5.1.1.06.23	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga
5.1.1.06.24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air
5.1.1.06.25	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah
5.1.1.06.26	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan

5.1.1.06.27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
5.1.1.06.28	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan
5.1.1.06.29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek
5.1.1.06.30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan
5.1.1.06.31	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas
5.1.1.06.32	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
5.1.1.06.33	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.1.07	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian
5.1.1.07.01	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja.
5.1.1.07.02	Iuran Jaminan Kecelakaan Kematian
5.1.2	Belanja Bunga
5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman
5.1.2.01.01	Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah
5.1.2.01.02	Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5.1.2.01.03	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank
5.1.2.01.04	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
5.1.2.01.05	Bunga Utang Pinjaman kepada BUMD
5.1.2.01.06	Bunga Utang Pinjaman kepada BUMN
5.1.2.01.07	Bunga Utang Pinjaman Lainnya
5.1.2.01.08	Dst.....
5.1.2.02	Bunga Utang Obligasi
5.1.2.02.01	Bunga Utang Obligasi
5.1.2.02.02	Dst.....
5.1.3	Belanja Subsidi
5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga
5.1.3.01.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan
5.1.3.01.02	Belanja Subsidi kepada Lembaga
5.1.3.01.03	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
5.1.4	Belanja Hibah
5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5.1.4.01.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5.1.4.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
5.1.4.02.01	Hibah kepada Pemerintah Provinsi
5.1.4.02.02	Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
5.1.4.02.03	Hibah kepada Pemerintah Kota
5.1.4.03	Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.4.03.01	Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.4.04	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
5.1.4.04.01	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah
5.1.4.04.02	Belanja Hibah kepada BUMD
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan
5.1.4.05.01	Belanja Hibah Kepada KONI
5.1.4.05.02	Belanja Hibah Kepada Palang Merah Indonesia
5.1.4.05.03	Belanja Hibah Kepada Pramuka
5.1.4.05.04	Belanja Hibah Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI)
5.1.4.05.05	Belanja Hibah Kepada Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)
5.1.4.05.06	Belanja Hibah Kepada Bundo Kanduang
5.1.4.05.07	Belanja Hibah Kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)
5.1.4.05.08	Belanja Hibah Kepada Badan Amil Zakat (Baznas)
5.1.4.05.09	Belanja Hibah Kepada KPU
5.1.4.05.10	Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal / Instansi Pemerintahan Lainnya.
5.1.4.05.11	Belanja Hibah Kepada BNK
5.1.4.05.12	Belanja Hibah Subsidi Bunga KUR
5.1.4.05.13	Belanja Hibah Kepada Mesjid Kota Sawahlunto
5.1.4.05.14	Belanja Hibah Kepada LPPL Radio Sawahlunto FM
5.1.4.05.15	Belanja Hibah Kepada MTs dan MAS Lunto
5.1.4.05.16	Belanja Hibah Kepada SLB
5.1.4.05.17	Belanja Hibah Kepada LKAAM

5.1.4.05.18	Belanja Hibah Kepada BAZNAS
5.1.4.05.19	Belanja Hibah Kepada FKUB
5.1.4.05.20	Belanja Hibah Kepada PANWASLU
5.1.4.05.21	Belanja Hibah Kepada Lembaga Pemasyarakatan
5.1.4.05.22	Belanja Hibah Kepada KAN
5.1.4.05.23	Belanja Hibah Kepada Pepabri, DHC 45, PWRI, JKPI dan Organisasi Lainnya
5.1.4.05.24	Belanja Hibah Kepada POLRES
5.1.4.05.25	Belanja Hibah Kepada SLTA Swasta / MAN dan MAS
5.1.4.05.26	Belanja Hibah Kepada MUI
5.1.4.05.27	Belanja Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan
5.1.4.05.28	Belanja Hibah Kepada YPAY Mudik Air Kota Sawahlunto
5.1.4.05.29	Belanja Hibah Kepada Masjid Almunawwarah Muhamadiyah
5.1.4.05.30	Belanja Hibah Kepada Grup Randai Yamin Sakato
5.1.4.05.31	Belanja Hibah Kepada Group Randai Minang Saiyo Kanagarian Sijantang Kec. Talawi
5.1.4.05.32	Belanja Hibah Kepada Masjid Alhidayah Desa Taratak Bancah
5.1.4.05.33	Belanja Hibah Kepada LPM Lunto Timur untuk Rehab Makam Gayek Tompok Desa Lunto Timur
5.1.4.05.34	Belanja Hibah Pengamanan PEMILU KDH
5.1.4.05.35	Belanja Hibah Kepada Bundo Kandung
5.1.4.05.36	Belanja Hibah TMMD Kepada TNI
5.1.4.05.37	Belanja Hibah Kepada PDM Muhammadiyah
5.1.4.05.38	Belanja Hibah Kepada PWI
5.1.4.05.39	Belanja Hibah Kepada Organisasi Wanita Se-Kota Sawahlunto
5.1.4.05.40	Belanja Hibah Kepada Mushalla Almuahajirin Desa Santur
5.1.4.05.41	Belanja Hibah Kepada Sanggar Permato Hitam
5.1.4.05.42	Belanja Hibah Dewan Pendidikan
5.1.4.05.43	Belanja Hibah Kepada Kantor Koramil 05 Talawi
5.1.4.05.44	Belanja Hibah TPQ Baitul Amal Sapan
5.1.4.05.45	Belanja Hibah Kepada Yayasan Rumah Tia
5.1.4.05.46	Belanja Hibah Kepada Bundo Kandung
5.1.4.05.47	Belanja Hibah Pembangunan Asrama dan Gedung Anak Yatim Piatu Yayasan Al-Ikhlas Kolok
5.1.4.05.48	Belanja Hibah Rehap Gedung Veteran
5.1.4.05.49	Belanja Hibah Kepada Yayasan Kasiah Bundo
5.1.4.05.50	Belanja Hibah Kepada Yayasan Waladun Soleha, Talago Gunuang
5.1.4.05.51	Belanja Hibah Kepada Yayasan Al-Irsyad Pasar Remaja
5.1.4.05.52	Belanja Hibah Kepada Mushalla Gunung Timbago
5.1.4.05.53	Belanja Hibah Kepada SDIT Cahaya Pelangi
5.1.4.05.54	Belanja Hibah Kepada Kwarcab 11 Gerakan Pramuka
5.1.4.05.55	Belanja Hibah Kepada Yayasan Khairu Ummah
5.1.4.05.56	Belanja Hibah Kepada DPC PEPABRI
5.1.4.05.57	Belanja Hibah Kepada PGRI
5.1.4.05.58	Belanja Hibah kepada Pondok Pesantren Ababil
5.1.4.05.59	Belanja Hibah kepada Sekolah Rabbani Islamic School
5.1.4.05.00	Belanja Hibah PAUD Pada Kecamatan Silungkang
5.1.4.05.01	Belanja Hibah PAUD pada Kecamatan Lembah Segar
5.1.4.05.02	Belanja Hibah PAUD pada Kecamatan Barangin
5.1.4.05.03	Belanja Hibah PAUD pada Kecamatan Talawi
5.1.4.05.04	Belanja Hibah Kepada Paud Teratai (Desa Silungkang Duo)
5.1.4.05.05	Belanja Hibah Kepada Paud Marhamah (Desa Silungkang Oso)
5.1.4.05.06	Belanja Hibah Kepada Paud Muthmainnah (Desa Silungkang Tigo)
5.1.4.05.07	Belanja Hibah Kepada Paud Rhaudatul Jannah (Desa Silungkang Tigo)
5.1.4.05.08	Belanja Hibah Kepada Paud Ar Razaq (Desa Silungkang)
5.1.4.05.09	Belanja Hibah Kepada Paud Ar Rahman (Desa Silungkang Tigo)
5.1.4.05.10	Belanja Hibah Kepada Paud Duta Ananda (Desa Silungkang Duo)
5.1.4.05.11	Belanja Hibah Kepada Paud Sayang Ibu (Desa Muaro Kalaban)
5.1.4.05.12	Belanja Hibah Kepada Paud Tunas Bangsa (Desa Taratak Bancah)
5.1.4.05.13	Belanja Hibah Kepada Paud Tunas Bangsa (Desa Muaro Kalaban)
5.1.4.05.14	Belanja Hibah Kepada Paud Bina Mitra (Desa Muaro Kalaban)
5.1.4.05.15	Belanja Hibah Kepada Paud Pelita Hati (Desa Muaro Kalaban)
5.1.4.05.16	Belanja Hibah Kepada TK Aisyiyah (Desa Silungkang Tigo)
5.1.4.05.17	Belanja Hibah Kepada TK Nurul Huda (Desa Silungkang Oso)
5.1.4.05.18	Belanja Hibah Kepada TK Al Islah II (Desa Silungkang Duo)
5.1.4.05.19	Belanja Hibah Kepada TK Al Islah I (Desa Silungkang Tigo)
5.1.4.05.20	Belanja Hibah Kepada TK Pertiwi III (Desa Muaro Kalaban)
5.1.4.05.21	Belanja Hibah Kepada Paud Mutiara Bunda (Desa Kubang Tengah)
5.1.4.05.22	Belanja Hibah Kepada KB Buah Hati (Kelurahan Kubang Sirakuk Utara)
5.1.4.05.23	Belanja Hibah Kepada Paud Mawar (Kelurahan Kubang Sirakuk Utara)
5.1.4.05.24	Belanja Hibah Kepada Paud Kasih Ibu (Kelurahan Kubang Utara Sikabu)
5.1.4.05.25	Belanja Hibah Kepada KB Kasih Ibu (Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan)

5.1.4.05.26	Belanja Hibah Kepada Paud Wista Younger (Kelurahan Tanah Lapang)
5.1.4.05.27	Belanja Hibah Kepada Kober Al - Irsyad (Kelurahan Pasar)
5.1.4.05.28	Belanja Hibah Kepada KB Qurata A'yun (Desa Kubang Tengah)
5.1.4.05.29	Belanja Hibah Kepada Paud Anugerah Ilahi (Kelurahan Pasar)
5.1.4.05.30	Belanja Hibah Kepada Paud Kasih Ibu (Desa Lunto Timur)
5.1.4.05.31	Belanja Hibah Kepada Paud Uswatun Hasanah (Desa Kubang Utara Sikabu)
5.1.4.05.32	Belanja Hibah Kepada Paud Permata Hati (Desa Pasar Kubang)
5.1.4.05.33	Belanja Hibah Kepada Paud Permata Bunda (Desa Kubang Utara Sikabu)
5.1.4.05.34	Belanja Hibah Kepada Paud Permata Bunda (Kelurahan Pasar)
5.1.4.05.35	Belanja Hibah Kepada Paud Kasih Sayang (Kelurahan Kubang Sirakuk Utara)
5.1.4.05.36	Belanja Hibah Kepada Paud Bunga Melur (Desa Lunto Timur)
5.1.4.05.37	Belanja Hibah Kepada Paud Melati Harapan (Kelurahan Aur Mulyo)
5.1.4.05.38	Belanja Hibah Kepada Paud Annisa (Desa Lunto Barat)
5.1.4.05.39	Belanja Hibah Kepada KB Mutiara Hati (Kelurahan Air Dingin)
5.1.4.05.40	Belanja Hibah Kepada Paud Cinta Bunda (Desa Kubang Utara Sikabu)
5.1.4.05.41	Belanja Hibah Kepada Paud Harapan Bunda (Desa Lunto Barat)
5.1.4.05.42	Belanja Hibah Kepada KB Islahul Ummah (Kelurahan Tanah Lapang)
5.1.4.05.43	Belanja Hibah Kepada KB Al Hamid (Desa Pasar Kubang)
5.1.4.05.44	Belanja Hibah Kepada TK Al Ikhlas (Desa Lunto Barat)
5.1.4.05.45	Belanja Hibah Kepada TK Santa Luncia (Kelurahan Pasar)
5.1.4.05.46	Belanja Hibah Kepada TK Pertiwi I (Kelurahan Kubang Sirakuk Utara)
5.1.4.05.47	Belanja Hibah Kepada TK Aisyiyah III (Kelurahan Pasar)
5.1.4.05.48	Belanja Hibah Kepada TK Lignita I (Kelurahan Tanah Lapang)
5.1.4.05.49	Belanja Hibah Kepada TK Al Irsyad (Kelurahan Pasar)
5.1.4.05.50	Belanja Hibah Kepada Paud Kasih Ibu (Kelurahan Durian I)
5.1.4.05.51	Belanja Hibah Kepada Paud Pelangi Nusantara (Kelurahan Durian II)
5.1.4.05.52	Belanja Hibah Kepada Paud Violet (Kelurahan Durian II)
5.1.4.05.53	Belanja Hibah Kepada Paud Permata Bunda (Desa Kolok Mudik)
5.1.4.05.54	Belanja Hibah Kepada Paud Seruni (Kelurahan Lubang Panjang)
5.1.4.05.55	Belanja Hibah Kepada Paud Restu Bunda (Kelurahan Durian I)
5.1.4.05.56	Belanja Hibah Kepada Paud Permata Bunda (Kelurahan Durian I)
5.1.4.05.57	Belanja Hibah Kepada Paud Kamboja (Kelurahan Lubang Panjang)
5.1.4.05.58	Belanja Hibah Kepada Paud Kasih Sayang Bunda (Kelurahan Saringan)
5.1.4.05.59	Belanja Hibah Kepada Paud Kasih Ibu Mekar Sari (Desa Kolok Nan Tuo)
5.1.4.05.60	Belanja Hibah Kepada TK An Nur (Desa Santur)
5.1.4.05.61	Belanja Hibah Kepada KB Kamboja (Desa Kolok Nan Tuo)
5.1.4.05.62	Belanja Hibah Kepada TK Restu Bunda (Desa Lumindai)
5.1.4.05.63	Belanja Hibah Kepada Paud Limpapeh (Desa Talago Gunung)
5.1.4.05.64	Belanja Hibah Kepada Paud Harapan Baru (Desa Balai Batu Sandaran Kajai)
5.1.4.05.65	Belanja Hibah Kepada KB Nurul Azzahra (Desa Santur)
5.1.4.05.66	Belanja Hibah Kepada Paud Mutiara Bunda (Desa Santur)
5.1.4.05.67	Belanja Hibah Kepada TK Harapan Bunda (Desa Talago Gunung)
5.1.4.05.68	Belanja Hibah Kepada TK Kemala Bayangkari (Kelurahan Saringan)
5.1.4.05.69	Belanja Hibah Kepada TPA Harapan Bangsa (Desa Santur)
5.1.4.05.70	Belanja Hibah Kepada Paud Harapan Kita (Desa Balai Batu Sandaran)
5.1.4.05.71	Belanja Hibah Kepada Paud Waladun Soleha (Desa Talago Gunung)
5.1.4.05.72	Belanja Hibah Kepada KB Al Zikrullah (Desa Santur)
5.1.4.05.73	Belanja Hibah Kepada KB Cikal Taruna (Desa Santur)
5.1.4.05.74	Belanja Hibah Kepada KB Harapan Bunda (Desa Talago Gunung)
5.1.4.05.75	Belanja Hibah Kepada KB Permata Hati (Desa Lumindai)
5.1.4.05.76	Belanja Hibah Kepada KB Rhaudatul Madinah (Kelurahan Durian I)
5.1.4.05.77	Belanja Hibah Kepada Paud Melati (Desa Talago Gunung)
5.1.4.05.78	Belanja Hibah Kepada TK Lignita III (Kelurahan Durian I)
5.1.4.05.79	Belanja Hibah Kepada TK Pertiwi II (Kelurahan Durian II)
5.1.4.05.80	Belanja Hibah Kepada Paud Pelita Hati (Desa Kumbayau)
5.1.4.05.81	Belanja Hibah Kepada KB Tunas Bangsa (Desa Kumbayau)
5.1.4.05.82	Belanja Hibah Kepada Paud Al Ikhlas (Desa Tumpuk Tengah)
5.1.4.05.83	Belanja Hibah Kepada Paud Manarul Huda (Desa Talawi Hilir)
5.1.4.05.84	Belanja Hibah Kepada Paud Nusa Indah (Desa Batu Tanjung)
5.1.4.05.85	Belanja Hibah Kepada Paud Mentari (Desa Talawi Hilir)
5.1.4.05.86	Belanja Hibah Kepada Paud Harapan Bangsa (Desa Bukit Gadang)
5.1.4.05.87	Belanja Hibah Kepada Paud Guguak Pincuran (Desa Bukit Gadang)
5.1.4.05.88	Belanja Hibah Kepada Paud Kasih Ibu (Desa Talawi Mudik)
5.1.4.05.89	Belanja Hibah Kepada Paud Bintang Kejora (Desa Sikalang)
5.1.4.05.90	Belanja Hibah Kepada Paud Buah Hati (Desa Salak)
5.1.4.05.91	Belanja Hibah Kepada Paud Al Hidayah (Desa Rantih)
5.1.4.05.92	Belanja Hibah Kepada Paud Cahaya Ibu (Desa Talawi Mudik)
5.1.4.05.93	Belanja Hibah Kepada Paud Talimato (Desa Talawi Hilir)
5.1.4.05.94	Belanja Hibah Kepada Paud Ananda (Desa Talawi Hilir)
5.1.4.05.95	Belanja Hibah Kepada KB Al Hafizh (Desa Sikalang)
5.1.4.05.96	Belanja Hibah Kepada Paud Bukit Sula (Desa Tumpuk Tengah)

5.1.4.05.97	Belanja Hibah Kepada Paud Cinta Ananda (Desa Sijantang Koto)
5.1.4.05.98	Belanja Hibah Kepada Paud Flamboyan (Desa Batu Tanjung)
5.1.4.05.99	Belanja Hibah Kepada Paud Sundak Langit (Desa Datar Mansiang)
5.1.4.05.00	Belanja Hibah Kepada TK Satu Atap Batu Kuali (Desa Batu Tanjuang)
5.1.4.05.01	Belanja Hibah Kepada TK Satu Atap Bukit Gadang (Desa Bukit Gadang)
5.1.4.05.02	Belanja Hibah Kepada TK Al Quran Ijtihad (Desa Sikalang)
5.1.4.05.03	Belanja Hibah Kepada TK Kasih Ibu Sijantang (Desa Sijantang Kota)
5.1.4.05.04	Belanja Hibah Kepada TK Thoyyibah (Desa Tumpuk Tengah)
5.1.4.05.05	Belanja Hibah Kepada TK Istiqomah (Desa Tumpuk Tengah)
5.1.4.05.06	Belanja Hibah Kepada TK Pertiwi IV (Desa Talawi Hilir)
5.1.4.05.07	Belanja Hibah Kepada TK Nurul Huda (Desa Kumbayau)
5.1.4.05.08	Belanja Hibah Kepada TK Tunas Melati (Desa Talawi Hilir)
5.1.4.05.09	Belanja Hibah Kepada TK Harapan Bunda (Desa Batu Tanjung)
5.1.4.05.10	Belanja Hibah Kepada Paud Karya Bunda (Desa Kubang Tengah)
5.1.4.05.11	Belanja Hibah Kepada Paud Kasih Ibu (Desa Kubang Tengah)
5.1.4.05.12	Belanja Hibah Kepada TPA Buah Hati (Kelurahan Kubang Sirakuk Utara)
5.1.4.05.13	Belanja Hibah kepada Bawaslu Provinsi Sumbar
5.1.4.05.14	Belanja Hibah Kepada KAN Talawi
5.1.4.05.15	Belanja Hibah Kepada Mesjid Kecamatan Talawi
5.1.4.05.16	Belanja Hibah Kepada Mushalla Kecamatan Talawi
5.1.4.05.17	Belanja Hibah Kepada Mesjid Kecamatan Lembah Segar
5.1.4.05.18	Belanja Hibah Kepada Mushalla Kecamatan Lembah Segar
5.1.4.05.19	Belanja Hibah Kepada Mesjid Kecamatan Barangin
5.1.4.05.21	Belanja Hibah Kepada Mushalla Kecamatan Barangin
5.1.4.05.22	Belanja Hibah Kepada Mesjid Kecamatan Silungkang
5.1.4.05.23	Belanja Hibah Kepada Mushalla Kecamatan Silungkang
5.1.4.05.24	Belanja Hibah Kepada Mesjid Abror Desa Kolok Mudik
5.1.4.05.25	Belanja Hibah Kepada Mesjid Istiqamah Kolok Nan tuo
5.1.4.05.26	Belanja Hibah Kepada Mesjid Nurul Yaqin Desa Kolok Nan Tuo
5.1.4.05.27	Belanja Hibah Kepada Mesjid Al-Furqan Kelurahan Saringan
5.1.4.05.28	Belanja Hibah Kepada Mesjid Taqwa Kelurahan Lubang Panjang
5.1.4.05.29	Belanja Hibah Kepada Mesjid Babussalam Kelurahan Lubang Panjang
5.1.4.05.30	Belanja Hibah Kepada Mesjid Nurul Huda Durian I
5.1.4.05.31	Belanja Hibah Kepada Mesjid Nurul Falah Durian I
5.1.4.05.32	Belanja Hibah Kepada Mushalla Al Ikhsan Durian II
5.1.4.05.33	Belanja Hibah Kepada Mushalla At Tanim Blok Ombilin
5.1.4.05.34	Belanja Hibah Kepada Mushalla Baitul Ikhlas Waringin
5.1.4.05.35	Belanja Hibah Kepada Mushalla Nurul Huda Desa BBS
5.1.4.05.36	Belanja Hibah Kepada Mushalla Raudatusholihin Kebun Jati Kelurahan Saringan
5.1.4.05.37	Belanja Hibah Kepada Mushalla Al Mukhlisin Desa Talago Gunung
5.1.4.05.38	Belanja Hibah Kepada Mesjid Baitun Nur Desa Pasar Kubang
5.1.4.05.39	Belanja Hibah Kepada Mesjid Agung Nurul Islam Kubang Sirakuk Utara
5.1.4.05.40	Belanja Hibah Kepada Mesjid Al Irsyad Kelurahan Pasar
5.1.4.05.41	Belanja Hibah Kepada Mesjid Taqwa Desa Kubang Tengah
5.1.4.05.42	Belanja Hibah Kepada Mesjid Al Munawarah Kelurahan Aur Mulyo
5.1.4.05.43	Belanja Hibah Kepada Mesjid Al Hidayah Kelurahan Air Dingn
5.1.4.05.44	Belanja Hibah Kepada Mesjid Nurul Ikhlas Kelurahan Tanah Lapang
5.1.4.05.45	Belanja Hibah Kepada Mesjid Ar Rahman Desa Lunto Timur
5.1.4.05.46	Belanja Hibah Kepada Mesjid Syuhada Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan
5.1.4.05.47	Belanja Hibah Kepada Mesjid Nurul Yaqin Desa Lunto Barat
5.1.4.05.48	Belanja Hibah Kepada Mushalla Ittihidayah Kelurahan Aur Mulyo
5.1.4.05.49	Belanja Hibah Kepada Mushalla Nurul Islam Desa Lunto Timur
5.1.4.05.50	Belanja Hibah Kepada Mushalla Ridho Ilahi Desa Lunto Barat
5.1.4.05.51	Belanja Hibah Kepada Mushalla Al Ikhlas Desa Kubang Tengah
5.1.4.05.52	Belanja Hibah Kepada Mushalla Nurul Iman Kelurahan Pasar
5.1.4.05.53	Belanja Hibah Kepada Mushalla Al Kautsar Desa Kubang Utara Sikabu
5.1.4.05.54	Belanja Hibah Kepada Mesjid Taqwa Dusun Binasi Talawi Mudik
5.1.4.05.55	Belanja Hibah Kepada Mesjid An- Nur Dusun Siambalau Talawi Hilir
5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
5.1.4.06.01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
5.1.4.06.02	Belanja Hibah Kepada Perorangan
5.1.4.07	Belanja Hibah Dana BOS
5.1.4.07.01	Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta
5.1.4.07.02	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta
5.1.4.08	Belanja Hibah Dana Alokasi Khusus
5.1.4.08.01	Belanja Hibah DAK
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial

5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana Kota Sawahlunto
5.1.5.01.02	Belanja Bantuan Sosial Kesehatan
5.1.5.01.03	Belanja Bantuan Sosial Duka Cita
5.1.5.01.04	Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk GAKIN dan pelajar berprestasi
5.1.5.01.05	Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk GAKIN dan pelajar berprestasi
5.1.5.01.06	Belanja Bantuan Sosial Kepada YPAY Mudik Air Kota Sawahlunto
5.1.5.01.07	Belanja Bantuan Sosial PerMakanan Lanjut Usia Terlantar Luar Panti
5.1.5.01.08	Belanja Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Kurang Mampu (Fasilitasi Kesehatan, Uang Duka dan lainnya)
5.1.5.01.09	Belanja Bantuan Sosial Untuk YPPC Lubang Panjang
5.1.5.01.10	Belanja Bantuan Sosial untuk Yayasan Pendidikan Kasiah Bundo Talawi
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
5.1.5.02.02	Dst.....
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
5.1.5.03.02	Dst.....
5.1.5.03.03	Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana Kepada Anggota Masyarakat
5.1.5.04	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
5.1.5.04.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik.....
5.1.5.04.02	Dst.....
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
5.1.6.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi
5.1.6.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Provinsi
5.1.6.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.02.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Lunto Timur
5.1.6.03.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Lunto Barat
5.1.6.03.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kubang Tengah
5.1.6.03.04	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kubang Utara Sikabu
5.1.6.03.05	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pasar Kubang
5.1.6.03.06	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Santur
5.1.6.03.07	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kolok Mudik
5.1.6.03.08	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kolok Nan Tuo
5.1.6.03.09	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Talago Gunung
5.1.6.03.10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Lumindai
5.1.6.03.11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Balai Batu Sandaran
5.1.6.03.12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Silungkang Oso
5.1.6.03.13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Silungkang Duo
5.1.6.03.14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Silungkang Tigo
5.1.6.03.15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Muaro Kalaban
5.1.6.03.16	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Taratak Bancha
5.1.6.03.17	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Talawi Hilir
5.1.6.03.18	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Talawi Mudik
5.1.6.03.19	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Bukit Gadang
5.1.6.03.20	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Batu Tanjung
5.1.6.03.21	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Kumbayau
5.1.6.03.22	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Tumpuk Tengah
5.1.6.03.23	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Datar Mansiang
5.1.6.03.24	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sijantang Koto
5.1.6.03.25	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Salak
5.1.6.03.26	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Sikalang
5.1.6.03.27	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Rantih
5.1.6.04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.04.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Lunto Timur
5.1.6.05.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Lunto Barat
5.1.6.05.03	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kubang Tengah
5.1.6.05.04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kubang Utara Sikabu

5.1.6.05.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Pasar Kubang
5.1.6.05.06	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Santur
5.1.6.05.07	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kolok Mudik
5.1.6.05.08	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kolok Nan Tuo
5.1.6.05.09	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Talago Gunung
5.1.6.05.10	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Lumindai
5.1.6.05.11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Balai Batu Sandaran
5.1.6.05.12	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Silungkang Oso
5.1.6.05.13	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Silungkang Duo
5.1.6.05.14	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Silungkang Tigo
5.1.6.05.15	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Muaro Kalaban
5.1.6.05.16	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Taratak Bancah
5.1.6.05.17	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Talawi Hilir
5.1.6.05.18	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Talawi Mudik
5.1.6.05.19	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Bukit Gadang
5.1.6.05.20	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Batu Tanjung
5.1.6.05.21	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Kumbayau
5.1.6.05.22	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tumpuk Tengah
5.1.6.05.23	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Datar Mansiang
5.1.6.05.24	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sijantang Koto
5.1.6.05.25	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Salak
5.1.6.05.26	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Sikalang
5.1.6.05.27	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Rantih
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
5.1.7.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi
5.1.7.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
5.1.7.02	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
5.1.7.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota....
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
5.1.7.03.01	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Lunto Timur
5.1.7.03.02	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Lunto Barat
5.1.7.03.03	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Kubang Tengah
5.1.7.03.04	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Kubang Utara Sikabu
5.1.7.03.05	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Pasar Kubang
5.1.7.03.06	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Santur
5.1.7.03.07	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Kolok Mudik
5.1.7.03.08	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Kolok Nan Tuo
5.1.7.03.09	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Talago Gunung
5.1.7.03.10	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Lumindai
5.1.7.03.11	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Balai Batu Sandaran
5.1.7.03.12	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Silungkang Oso
5.1.7.03.13	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Silungkang Duo
5.1.7.03.14	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Silungkang Tigo
5.1.7.03.15	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Muaro Kalaban
5.1.7.03.16	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Taratak Bancah
5.1.7.03.17	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Talawi Hilir
5.1.7.03.18	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Talawi Mudik
5.1.7.03.19	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Bukit Gadang
5.1.7.03.20	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Batu Tanjung
5.1.7.03.21	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Kumbayau
5.1.7.03.22	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Tumpuk Tengah
5.1.7.03.23	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Datar Mansiang
5.1.7.03.24	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Sijantang Koto
5.1.7.03.25	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Salak
5.1.7.03.26	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Sikalang
5.1.7.03.27	Belanja Dana Desa (DD) Kepada Desa Rantih
5.1.7.03.28	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Lunto Timur
5.1.7.03.29	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Lunto Barat
5.1.7.03.30	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Kubang Tengah
5.1.7.03.31	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Kubang Utara Sikabu
5.1.7.03.32	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Pasar Kubang
5.1.7.03.33	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Santur
5.1.7.03.34	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Kolok Mudik
5.1.7.03.35	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Kolok Nan Tuo
5.1.7.03.36	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Talago Gunung
5.1.7.03.37	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Lumindai
5.1.7.03.38	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Balai Batu Sandaran

5.1.7.03.39	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Silungkang Oso
5.1.7.03.40	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Silungkang Duo
5.1.7.03.41	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Silungkang Tigo
5.1.7.03.42	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Muaro Kalaban
5.1.7.03.43	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Taratak Banchah
5.1.7.03.44	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Talawi Hilir
5.1.7.03.45	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Talawi Mudiak
5.1.7.03.46	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Bukik Gadang
5.1.7.03.47	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Batu Tanjung
5.1.7.03.48	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Kumbayau
5.1.7.03.49	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Tumpuk Tengah
5.1.7.03.50	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Datar Mansiang
5.1.7.03.51	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Sijantang Koto
5.1.7.03.52	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Salak
5.1.7.03.53	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Sikalang
5.1.7.03.54	Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada Desa Rantih
5.1.7.03.57	Belanja Dana Desa (DD)
5.1.7.03.58	Alokasi Dana Desa (ADD)
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya
5.1.7.04.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
5.1.7.04.02	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota
5.1.7.04.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Perindo
5.1.7.05.02	Belanja Bantuan Kepada Partai Gerindra
5.1.7.05.03	Belanja Bantuan Kepada Partai PKPI
5.1.7.05.04	Belanja Bantuan Kepada Partai PKS
5.1.7.05.05	Belanja Bantuan Kepada Partai PAN
5.1.7.05.07	Belanja Bantuan Kepada Partai Golkar
5.1.7.05.08	Belanja Bantuan Kepada Partai PPP
5.1.7.05.09	Belanja Bantuan Kepada Partai PDI Perjuangan
5.1.7.05.10	Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat
5.1.7.05.11	Belanja Bantuan Kepada Partai Nasdem
5.1.7.06	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota
5.1.7.06.01	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota
5.1.7.06.02	Dst.....
5.1.8	Belanja Tidak Terduga
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga
5.1.8.01.02	Belanja Tak Terduga Bencana Alam
5.1.8.01.03	Bencana Tak Terduga Luar Biasa Lainnya
5.2	BELANJA LANGSUNG
5.2.1	Belanja Pegawai
5.2.1.01	Honorarium PNS
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan
5.2.1.01.04	Honorarium Penatausahaan Keuangan dan Barang
5.2.1.01.05	Honorarium Pengawas Kegiatan Fisik
5.2.1.01.06	Honorarium Instansi terkait
5.2.1.01.07	Honorarium Fasilitator/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.01.08	Honorarium Pelayanan Tindak Medis dan Jaga
5.2.1.01.09	Honorarium Perencanaan Teknis
5.2.1.01.10	Honorarium Tim Monitoring / Evaluasi
5.2.1.01.11	Honorarium Penyusunan Naskah Ujian
5.2.1.01.12	Honorarium Pemeriksa Ujian
5.2.1.01.13	Honorarium Pengawas Ujian
5.2.1.01.14	Honorarium Piket Lebaran dan PAM Daerah
5.2.1.02	Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir / Tidak Tetap / Pegawai dengan Perjanjian Kerja
5.2.1.02.03	Honorarium Upah Harian
5.2.1.02.04	Honorarium Pembantu Penatausahaan Keuangan dan Barang
5.2.1.02.05	Honorarium Perencanaan Teknis Non PNS

5.2.1.02.06	Honorarium Petugas Pengantar Surat (Caraka)
5.2.1.02.07	Honorarium Petugas Bidang Pendidikan
5.2.1.02.08	Honorarium Petugas Bidang Kesehatan
5.2.1.02.09	Honorarium Petugas Bidang Lingkungan
5.2.1.02.10	Honorarium Petugas Bidang Pekerjaan Umum
5.2.1.02.11	Honorarium Petugas Bidang Keagamaan
5.2.1.02.12	Honorarium Petugas Bidang Bidang Pertanian / Peternakan
5.2.1.02.13	Honorarium Petugas Bidang Sosial
5.2.1.02.14	Honorarium Petugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5.2.1.02.15	Honorarium Petugas Bidang Kepegawaian
5.2.1.02.16	Honorarium Petugas Bidang Kependudukan
5.2.1.02.17	Honorarium Petugas Bidang Perhubungan
5.2.1.02.18	Honorarium Petugas Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
5.2.1.02.19	Honorarium Petugas Bidang Perencanaan Pembangunan
5.2.1.02.20	Honorarium Petugas Bidang Teknologi
5.2.1.02.21	Honorarium Petugas Bidang Pemerintahan Umum
5.2.1.02.22	Honorarium Petugas Satuan Tugas Pengelolaan Pengamanan Daerah Perkotaan
5.2.1.03	Uang Lembur
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS
5.2.1.04	Honorarium Pengelolaan Dana BOS
5.2.1.04.01	Honorarium Pengelolaan Dana BOS
5.2.1.05	Uang untuk Diberikan Kepada pihak ketiga/masyarakat
5.2.1.05.01	Uang untuk Diberikan Kepada pihak ketiga.
5.2.1.05.02	Uang untuk Diberikan Kepada masyarakat.
5.2.1.06	Belanja Jasa Non Pegawai / Pihak Ketiga / Umum
5.2.1.06.01	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Notaris
5.2.1.06.02	Belanja Honorarium Juri/ Penilai/ Pembina
5.2.1.06.03	Belanja Honorarium Moderator
5.2.1.06.04	Belanja Honorarium MC/ Pembawa Acara
5.2.1.06.05	Belanja Honorarium Pembaca Doa/ Alquran
5.2.1.06.06	Belanja Honorarium Penceramah agama / Mubaligh / Garim
5.2.1.06.07	Belanja Honorarium Kader
5.2.1.06.08	Belanja Honorarium Petugas Pelaksana Upacara Hari -Hari Besar
5.2.1.06.09	Belanja Honorarium Petugas Pemberdayaan Masyarakat
5.2.1.06.10	Belanja Honorarium Petugas Pramuniaga / Pelayanan
5.2.1.06.11	Belanja Honorarium Petugas Bidang Kesehatan
5.2.1.06.12	Belanja Honorarium Petugas Bidang Lingkungan
5.2.1.06.13	Belanja Honorarium Petugas Bidang Pertanian / Peternakan
5.2.1.06.14	Belanja Honorarium Petugas Bidang Pendidikan
5.2.1.06.15	Belanja Honorarium Petugas Bidang Keagamaan
5.2.1.06.16	Belanja Honorarium Petugas Pengamanan
5.2.1.06.17	Belanja Honorarium Petugas Pemasangan Instalasi
5.2.1.06.18	Belanja Honorarium Petugas Kebersihan
5.2.1.06.19	Belanja Honorarium Petugas Pemandu
5.2.1.06.20	Belanja Honorarium Petugas Sound System
5.2.1.06.21	Belanja Honorarium Petugas Penagih Pinjaman Dana Bergulir
5.2.1.06.22	Belanja Honorarium Petugas Pendataan Kependudukan
5.2.1.06.23	Belanja Honorarium Petugas Pelantikan dan Sumpah
5.2.1.06.24	Belanja Honorarium Petugas Motifasi Dukun Beranak
5.2.1.06.25	...
5.2.1.06.26	...
5.2.1.06.27	...
5.2.1.06.28	Belanja Honorarium Peserta Kegiatan Keagamaan
5.2.1.06.29	Belanja Honorarium Peserta Kegiatan Pendidikan
5.2.1.06.30	Belanja Honorarium Peserta Kegiatan Kesehatan
5.2.1.06.31	Belanja Honorarium Peserta Kegiatan Sosial
5.2.1.06.32	Belanja Honorarium Peserta Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga
5.2.1.06.33	Belanja Honorarium Peserta Kegiatan Kesenian
5.2.1.06.34	Belanja Honorarium Peserta Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
5.2.1.06.35	...
5.2.1.06.36	...
5.2.1.06.37	...
5.2.1.06.38	Belanja Honorarium Buruh/ Tukang/ Mandor
5.2.1.07	Belanja Pegawai BLUD
5.2.1.07.01	Belanja Pegawai BLUD

5.2.2	Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas
5.2.2.01.09	Belanja Bendera / Umbul - umbul / Lajur / Marawa / Spanduk / Papan Informasi
5.2.2.01.10	Belanja Perlengkapan kerja
5.2.2.01.11	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga
5.2.2.01.12	Belanja Perlengkapan Keagamaan
5.2.2.01.13	Belanja Perlengkapan Peserta Pelatihan (Seminar Kit)
5.2.2.01.14	Belanja Perlengkapan Olahraga
5.2.2.01.15	Belanja Perlengkapan Pendidikan
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Kesehatan
5.2.2.01.17	Belanja Pengadaan Buku KIA dan KMS Lansia
5.2.2.01.18	Belanja Pengadaan Buku Adat dan Agama
5.2.2.01.19	Belanja Pengadaan Alat -Alat Kesehatan Sekolah
5.2.2.01.20	Belanja Penghargaan / Hadiah / Reward
5.2.2.01.21	Belanja Barang yang diserahkan Kepada Peserta Kegiatan
5.2.2.01.22	Belanja Cadangan Pangan Pemerintah Kota
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia
5.2.2.02.06	Belanja Bahan Laboratorium
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Percontohan
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Pakan Ternak/ Konsentrat
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Perkolaman
5.2.2.02.11	Belanja Bahan Cendra mata/Souvenir
5.2.2.02.12	Belanja Bahan Dekorasi
5.2.2.02.13	Belanja Bahan Pengujian Kendaraan
5.2.2.02.14	Belanja Bahan Keterampilan
5.2.2.02.15	Belanja Bahan Persediaan Makanan Pokok
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01	Belanja Telepon
5.2.2.03.02	Belanja Air
5.2.2.03.03	Belanja Listrik
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5.2.2.03.10	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
5.2.2.03.11	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Dokumentasi
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Publikasi / Jumpa Pers
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Akomodasi
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Transportasi
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Hiburan
5.2.2.03.17	Belanja Jasa Perizinan
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Informasi/ Promosi/ Peliputan
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Penyusunan Naskah
5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pemeriksa Labor
5.2.2.03.21	Belanja Iuran Retribusi Kebersihan
5.2.2.03.22	Belanja TV Berlangganan
5.2.2.03.23	Belanja Iuran APEKSI
5.2.2.03.24	Belanja Iuran Forum SEKDA
5.2.2.03.25	Belanja Iuran JKPI
5.2.2.03.26	Belanja Iuran PBB
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Pengamanan / Piket Malam Kantor
5.2.2.03.28	Belanja Iuran Pertanahan

5.2.2.03.29	...
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Jiwa
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.03	Belanja Penggantian Pelumas Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR / SWDLAJ dan Administrasi STNK
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan / Pajak Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.07	dst.....
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01	Belanja Cetak
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan / Fotocopy
5.2.2.06.03	Belanja Jilid
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Gudang/Tanah/Tempat
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/hanggar Sarana Mobilitas
5.2.2.07.05	Dst.....
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air
5.2.2.08.03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
5.2.2.08.04	Dst ...
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat
5.2.2.09.01	Belanja Sewa Traktor
5.2.2.09.02	Belanja Sewa Grader/Bulldoser
5.2.2.09.03	Belanja Sewa Eskavator
5.2.2.09.04	Belanja Sewa Hauler/dump truck
5.2.2.09.05	Belanja Sewa Beckoeloder
5.2.2.09.06	Belanja Sewa Mesin gilas/Fibro
5.2.2.09.07	Belanja Sewa Stamper
5.2.2.09.08	Belanja Sewa Mesin las
5.2.2.09.09	Belanja Sewa kompressor
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi
5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Perlengkapan Praktek
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Sound System / Alat Musik
5.2.2.10.09	Belanja Sewa Bunga/Taman
5.2.2.10.10	Belanja Sewa Alat Hiburan
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan / Pelatihan
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Pasien
5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Korban Bencana
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Kerja Dokter / Perawat
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.14.01	Belanja Pakaian KORPRI
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Lomba
5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Kader
5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Pramuka
5.2.2.14.08	Belanja Pakaian Paskibra
5.2.2.14.09	Belanja Pakaian Panitia Kegiatan
5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Dukun Beranak
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5.2.2.16.01	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3
5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas belajar S2 / Dokter Spesialis
5.2.2.16.04	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
5.2.2.16.05	Belanja Pendidikan Izin belajar PNS
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.17.04	Belanja Ujian Dinas dan Seleksi Diklat / Pelatihan
5.2.2.17.05	Belanja Diklat PIM
5.2.2.17.06	Belanja Kontribusi Peserta Pelatihan
5.2.2.17.07	Belanja Kegiatan magang
5.2.2.18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5.2.2.18.01	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah
5.2.2.18.02	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah
5.2.2.19	Belanja Pemulangan Pegawai
5.2.2.19.01	Belanja Pemulangan pegawai yang pensiun
5.2.2.19.02	Belanja Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan Tugas
5.2.2.19.03	Belanja Penggantian Lelang Kendaraan Dinas Bagi PNS yang Memasuki Masa Pensiun
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Tanah
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Fasilitas Umum
5.2.2.20.07	Dst.....
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Appraisal
5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultan / Lembaga
5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS
5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

5.2.2.23.03	Dst.....
5.2.2.24	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.24.01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
5.2.2.24.02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
5.2.2.24.03	Dst.....
5.2.2.25	Belanja Pendidikan / Pelatihan / Magang Non PNS
5.2.2.25.01	Belanja Kursus-Kursus singkat/ pelatihan
5.2.2.25.02	Belanja Sosialisasi
5.2.2.25.03	Belanja Bimbingan Teknis
5.2.2.25.04	Belanja Kontribusi Peserta Pelatihan
5.2.2.25.05	Belanja Kegiatan Magang
5.2.2.26	Belanja Ganti Rugi
5.2.2.26.01	Belanja Ganti Rugi Tanaman
5.2.2.26.02	Belanja Ganti Rugi Tanah/Bangunan
5.2.2.26.03	Belanja Ganti Rugi Bangunan
5.2.2.27	Dana Siap Pakai Tanggap Darurat
5.2.2.27.01	Dana Siap Pakai Tanggap Darurat Bencana
5.2.2.28	Belanja Barang dan Jasa BLUD
5.2.2.28.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD
5.2.2.29	Belanja Kegiatan Pameran / Seminar / Lokakarya
5.2.2.29.01	Belanja Kegiatan Pameran
5.2.2.29.02	Belanja Kegiatan Seminar
5.2.2.29.03	Belanja Kegiatan Lokakarya
5.2.2.35	Belanja Fasilitas Kesehatan
5.2.2.35.01	Belanja Fasilitas Kesehatan PNS
5.2.2.35.02	Belanja Fasilitas Kesehatan Non PNS
5.2.2.35.03	Belanja Fasilitas Jamsostek Non PNS
5.2.2.35.04	Belanja Fasilitas JPKM Non PNS
5.2.2.35.05	Belanja Fasilitas Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5.2.2.35.06	Belanja Fasilitas Premi Asuransi Jiwa
5.2.2.36	Belanja Fasilitas Pernikahan
5.2.2.36.01	Belanja Fasilitas Pernikahan PNS
5.2.2.36.02	Belanja Fasilitas Pernikahan Non PNS
5.2.2.37	Belanja Jasa Pelayanan
5.2.2.37.01	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
5.2.2.37.02	Belanja Jasa Pelayanan Persalinan
5.2.2.37.03	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas
5.2.3	Belanja Modal
5.2.3.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan
5.2.3.01.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kampung
5.2.3.01.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Emplasmen
5.2.3.01.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kuburan
5.2.3.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pertanian
5.2.3.02.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami
5.2.3.02.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tegalan
5.2.3.02.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Ladang
5.2.3.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan
5.2.3.03.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan
5.2.3.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Campuran
5.2.3.04.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Bidang Tanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan
5.2.3.04.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kebun Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain
5.2.3.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan
5.2.3.05.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Lebat
5.2.3.05.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Belukar
5.2.3.05.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Tanaman Jenis
5.2.3.05.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa

5.2.3.05.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus
5.2.3.06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan
5.2.3.06.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Tambak
5.2.3.06.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar
5.2.3.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau/Rawa
5.2.3.07.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rawa
5.2.3.07.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Danau
5.2.3.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus/Rusak
5.2.3.08.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandus
5.2.3.08.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rusak
5.2.3.09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput
5.2.3.09.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Alang-alang
5.2.3.09.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Padang Rumput
5.2.3.10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain
5.2.3.10.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Penggalan
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
5.2.3.11.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal
5.2.3.11.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
5.2.3.11.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri
5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
5.2.3.11.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong
5.2.3.11.06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Peternakan
5.2.3.11.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan
5.2.3.11.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
5.2.3.11.09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst
5.2.3.12	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan
5.2.3.12.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan
5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
5.2.3.13.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga
5.2.3.13.02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir
5.2.3.13.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang
5.2.3.13.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
5.2.3.13.05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
5.2.3.13.06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Terbang
5.2.3.13.07	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan
5.2.3.13.08	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air
5.2.3.13.09	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi
5.2.3.13.10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan
5.2.3.13.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
5.2.3.13.12	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga
5.2.3.13.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah
5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat
5.2.3.14.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Tractor
5.2.3.14.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Grader
5.2.3.14.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator
5.2.3.14.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pile Driver
5.2.3.14.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Hauler
5.2.3.14.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Asphal Equipment
5.2.3.14.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compacting Equipment
5.2.3.14.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment
5.2.3.14.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Loader
5.2.3.14.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat
5.2.3.14.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses
5.2.3.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung
5.2.3.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Dredger
5.2.3.15.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Floating Excavator
5.2.3.15.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amphibi Dredger
5.2.3.15.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Tarik
5.2.3.15.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses Agung
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu

5.2.3.16.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik
5.2.3.16.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder
5.2.3.16.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor
5.2.3.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa
5.2.3.16.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor
5.2.3.16.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan
5.2.3.16.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor
5.2.3.16.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5.2.3.18.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
5.2.3.18.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak
5.2.3.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor
5.2.3.19.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang
5.2.3.19.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
5.2.3.19.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
5.2.3.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
5.2.3.20.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
5.2.3.20.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
5.2.3.20.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus
5.2.3.21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara
5.2.3.21.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Terbang
5.2.3.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
5.2.3.22.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
5.2.3.22.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
5.2.3.22.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5.2.3.22.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service
5.2.3.22.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin
5.2.3.22.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu
5.2.3.22.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus
5.2.3.22.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Las
5.2.3.22.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pabrik Es
5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
5.2.3.23.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
5.2.3.23.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5.2.3.23.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Service
5.2.3.23.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Pengangkat
5.2.3.23.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)
5.2.3.23.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)
5.2.3.23.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
5.2.3.23.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi
5.2.3.23.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu
5.2.3.23.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kulit
5.2.3.23.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Feting

5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur
5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal
5.2.3.24.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia
5.2.3.24.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
5.2.3.24.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain
5.2.3.24.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi
5.2.3.24.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Oscilloscope
5.2.3.24.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Universal Tester
5.2.3.24.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding
5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya
5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora
5.2.3.24.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa
5.2.3.24.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Kering
5.2.3.24.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL
5.2.3.24.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu
5.2.3.24.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Gelas Takar Berbagai Kapasitas
5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan
5.2.3.25.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
5.2.3.25.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen/Pengolahan
5.2.3.25.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan
5.2.3.25.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
5.2.3.25.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5.2.3.25.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Prosesing
5.2.3.25.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pasca Panen
5.2.3.25.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan
5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
5.2.3.26.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen
5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan
5.2.3.26.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
5.2.3.26.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penangkap Ikan
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik
5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung /Jumlah
5.2.3.27.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
5.2.3.28.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer
5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat
5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
5.2.3.30.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
5.2.3.30.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Staf

5.2.3.30.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Staf
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
5.2.3.31.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A
5.2.3.31.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak
5.2.3.31.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing
5.2.3.31.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
5.2.3.32.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB
5.2.3.32.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM
5.2.3.32.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF
5.2.3.32.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF
5.2.3.32.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
5.2.3.32.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Sandi
5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar
5.2.3.33.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW
5.2.3.33.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW
5.2.3.33.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM
5.2.3.33.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar UHF
5.2.3.33.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar SHF
5.2.3.33.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena MF/MW
5.2.3.33.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena HF/SW
5.2.3.33.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM
5.2.3.33.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena UHF
5.2.3.33.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola
5.2.3.33.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator VHF/VHF
5.2.3.33.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF
5.2.3.33.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator VHF/UHF
5.2.3.33.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF
5.2.3.33.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe FPU
5.2.3.33.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe Terrestrial
5.2.3.33.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe TVRO
5.2.3.33.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Dummy Load
5.2.3.33.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher Antena
5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena
5.2.3.33.21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder
5.2.3.33.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Humidity Control
5.2.3.33.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Program Input Equipment
5.2.3.33.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum
5.2.3.34.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
5.2.3.34.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana
5.2.3.34.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata
5.2.3.34.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T
5.2.3.34.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rotgen
5.2.3.34.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi
5.2.3.34.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah
5.2.3.34.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5.2.3.34.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam
5.2.3.34.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mortuary
5.2.3.34.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak
5.2.3.34.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Poliklinik Set
5.2.3.34.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh
5.2.3.34.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
5.2.3.34.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung
5.2.3.34.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir
5.2.3.34.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi
5.2.3.34.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
5.2.3.34.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat
5.2.3.34.21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa

5.2.3.34.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Hewan
5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan
5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
5.2.3.35.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
5.2.3.35.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut
5.2.3.35.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara
5.2.3.35.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
5.2.3.35.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga
5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
5.2.3.36.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air
5.2.3.36.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
5.2.3.36.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia
5.2.3.36.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika
5.2.3.36.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi
5.2.3.36.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
5.2.3.36.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
5.2.3.36.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan
5.2.3.36.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Cocok Tanam
5.2.3.36.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
5.2.3.36.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
5.2.3.36.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum
5.2.3.36.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum A
5.2.3.36.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran
5.2.3.36.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
5.2.3.36.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia
5.2.3.36.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A
5.2.3.36.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi
5.2.3.36.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi
5.2.3.36.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi
5.2.3.36.21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Film
5.2.3.36.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Makanan
5.2.3.36.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
5.2.3.36.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi
5.2.3.36.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika
5.2.3.36.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika
5.2.3.36.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi
5.2.3.36.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan
5.2.3.36.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pasir
5.2.3.36.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
5.2.3.36.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
5.2.3.36.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Metalography
5.2.3.36.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan
5.2.3.36.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
5.2.3.36.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
5.2.3.36.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie
5.2.3.36.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
5.2.3.36.38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
5.2.3.36.39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil
5.2.3.36.40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstel
5.2.3.36.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik

5.2.3.36.42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
5.2.3.36.43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
5.2.3.36.44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik
5.2.3.36.45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
5.2.3.36.46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5.2.3.36.47	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A
5.2.3.36.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B
5.2.3.36.49	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
5.2.3.36.50	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium energi Surya
5.2.3.36.51	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
5.2.3.36.52	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi
5.2.3.36.53	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
5.2.3.36.54	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan
5.2.3.36.55	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi
5.2.3.36.56	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika
5.2.3.36.57	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Tambang
5.2.3.36.58	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
5.2.3.36.59	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri
5.2.3.36.60	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
5.2.3.36.61	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Kearsipan
5.2.3.36.62	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis
5.2.3.36.63	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A
5.2.3.36.64	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya
5.2.3.36.65	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
5.2.3.37.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia
5.2.3.37.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika
5.2.3.37.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar
5.2.3.37.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan
5.2.3.37.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah
5.2.3.37.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas
5.2.3.37.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS
5.2.3.37.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam
5.2.3.37.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan
5.2.3.37.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian
5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga
5.2.3.37.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : PMP
5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain
5.2.3.38	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
5.2.3.38.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Analytical instrument
5.2.3.38.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Instrument Probe/Sensor
5.2.3.38.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan General Laboratory Tool
5.2.3.38.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Instrument Probe/Sensor A
5.2.3.38.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Glassware Plastic/Utensils
5.2.3.38.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratory Safety Equipment
5.2.3.39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
5.2.3.39.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Detector
5.2.3.39.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Modular Counting and Scentific
5.2.3.39.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Assembly/Accounting System
5.2.3.39.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Recorder Display
5.2.3.39.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power Supply
5.2.3.39.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Measuring / Testing Device
5.2.3.39.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Opto Electronics
5.2.3.39.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Accelator
5.2.3.39.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Reactor Expermental System

5.2.3.40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
5.2.3.40.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan
5.2.3.40.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja
5.2.3.40.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Proteksi Lingkungan
5.2.3.40.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meteorological Equipment
5.2.3.40.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Sumber Radiasi
5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Lab
5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Application Equipment
5.2.3.41.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Destructive Test (NDT) Device
5.2.3.41.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Umum Kedokteran / Klinik Nuklir
5.2.3.41.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Hidrologi
5.2.3.42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5.2.3.42.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah
5.2.3.42.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara
5.2.3.42.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
5.2.3.42.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Lingkungan
5.2.3.42.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang
5.2.3.43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
5.2.3.43.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Towing Carriage
5.2.3.43.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave Generator and Absorber
5.2.3.43.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data Acquisition and Analyzing System
5.2.3.43.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Cavitation Tunnel
5.2.3.43.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Overhead Cranes
5.2.3.43.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum
5.2.3.43.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Model Ship Workshop
5.2.3.43.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Propeller Model Workshop
5.2.3.43.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop
5.2.3.43.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop
5.2.3.43.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan Painting Shop
5.2.3.43.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Ship Model Preparation Shop
5.2.3.43.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pemesinan : Electrical Workshop
5.2.3.43.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan MOB
5.2.3.43.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Photo and Film Equipment
5.2.3.44	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Api
5.2.3.44.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Senjata Genggam
5.2.3.44.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Pinggang
5.2.3.44.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang
5.2.3.44.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senapan Mesin
5.2.3.44.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Mortir
5.2.3.44.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Anti Lapis Baja
5.2.3.44.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Artileri Medan (Armed)
5.2.3.44.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)
5.2.3.44.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peluru Kendali/Rudal
5.2.3.44.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Kavaleri
5.2.3.44.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Lain-lain
5.2.3.45	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api
5.2.3.45.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan
5.2.3.45.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Non Senjata Api
5.2.3.46	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi

5.2.3.46.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi Umum
5.2.3.46.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi Darat
5.2.3.47	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Senjata Sinar
5.2.3.47.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Laser
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan
5.2.3.48.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan
5.2.3.48.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang
5.2.3.49.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel
5.2.3.49.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi
5.2.3.49.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium
5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan
5.2.3.49.07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Oceanarium/Opservatorium
5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah
5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5.2.3.49.13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
5.2.3.49.14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
5.2.3.49.15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
5.2.3.49.16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik
5.2.3.49.17	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Stasiun Bus
5.2.3.49.18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak
5.2.3.49.19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan
5.2.3.49.20	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Museum
5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
5.2.3.49.22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan
5.2.3.49.23	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan
5.2.3.49.24	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan
5.2.3.49.25	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium
5.2.3.49.26	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5.2.3.50.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I
5.2.3.50.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II
5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III
5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
5.2.3.50.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama
5.2.3.50.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Hotel
5.2.3.50.07	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Motel

5.2.3.50.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun
5.2.3.51	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara
5.2.3.51.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai
5.2.3.51.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara
5.2.3.51.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi
5.2.3.52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah
5.2.3.52.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Istana Peringatan
5.2.3.52.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Adat
5.2.3.52.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Peningggalan Sejarah
5.2.3.52.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah
5.2.3.52.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan
5.2.3.53.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Kemerdekaan
5.2.3.53.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan
5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya
5.2.3.54	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi
5.2.3.54.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Hindhu
5.2.3.54.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Budha
5.2.3.54.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Lainnya
5.2.3.55	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan
5.2.3.55.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah
5.2.3.56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti
5.2.3.56.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti
5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Tugu/Tanda Batas
5.2.3.58	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Rambu-Rambu
5.2.3.58.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
5.2.3.58.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Rambu Tidak Bersuar
5.2.3.59	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
5.2.3.59.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Rumwey/Threshold Light
5.2.3.59.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI)
5.2.3.59.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Approach Light
5.2.3.59.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Rumwey Identification Light (Rells)
5.2.3.59.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Signal
5.2.3.59.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Flood Light
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan
5.2.3.60.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Propinsi
5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
5.2.3.60.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa
5.2.3.60.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus
5.2.3.60.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Tol
5.2.3.60.07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kereta
5.2.3.60.08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang
5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan
5.2.3.61.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Negara/Nasional
5.2.3.61.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Propinsi
5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota
5.2.3.61.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa
5.2.3.61.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Khusus

5.2.3.61.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol
5.2.3.61.07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api
5.2.3.61.08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
5.2.3.61.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan
5.2.3.62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi
5.2.3.62.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi
5.2.3.62.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi
5.2.3.62.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi
5.2.3.62.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi
5.2.3.62.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi
5.2.3.62.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi
5.2.3.63	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut
5.2.3.63.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Pasang Surut
5.2.3.63.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut
5.2.3.63.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut
5.2.3.63.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut
5.2.3.63.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut
5.2.3.63.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut
5.2.3.63.07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut
5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa
5.2.3.64.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
5.2.3.64.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
5.2.3.64.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa
5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa
5.2.3.64.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut
5.2.3.64.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
5.2.3.64.07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
5.2.3.65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan
5.2.3.65.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
5.2.3.65.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
5.2.3.65.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman
5.2.3.65.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5.2.3.65.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
5.2.3.65.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
5.2.3.65.07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Bencana Alam
5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air
5.2.3.66.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air

5 . 2 . 3 . 66 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5 . 2 . 3 . 66 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
5 . 2 . 3 . 66 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air
5 . 2 . 3 . 66 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
5 . 2 . 3 . 67 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku
5 . 2 . 3 . 67 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih
5 . 2 . 3 . 67 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
5 . 2 . 3 . 67 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
5 . 2 . 3 . 68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor
5 . 2 . 3 . 68 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor
5 . 2 . 3 . 68 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor
5 . 2 . 3 . 68 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor
5 . 2 . 3 . 68 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor
5 . 2 . 3 . 68 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor
5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air
5 . 2 . 3 . 69 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut
5 . 2 . 3 . 69 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar
5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih
5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Muka Tanah
5 . 2 . 3 . 70 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air
5 . 2 . 3 . 70 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam
5 . 2 . 3 . 70 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dangkal
5 . 2 . 3 . 70 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya
5 . 2 . 3 . 71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor
5 . 2 . 3 . 71 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor
5 . 2 . 3 . 71 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri
5 . 2 . 3 . 71 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian
5 . 2 . 3 . 72	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah
5 . 2 . 3 . 72 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
5 . 2 . 3 . 72 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5 . 2 . 3 . 73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5 . 2 . 3 . 73 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik
5 . 2 . 3 . 74 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air
5 . 2 . 3 . 74 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
5 . 2 . 3 . 74 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)
5 . 2 . 3 . 74 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)

5.2.3.74.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
5.2.3.74.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
5.2.3.74.07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
5.2.3.74.08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
5.2.3.74.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
5.2.3.74.10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
5.2.3.74.11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera (PLTSm)
5.2.3.75	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik
5.2.3.75.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk
5.2.3.75.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi
5.2.3.75.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik
5.2.3.76	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan
5.2.3.76.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertahanan Di Darat
5.2.3.77	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gas
5.2.3.77.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Gas
5.2.3.77.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas
5.2.3.78	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman
5.2.3.78.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum
5.2.3.79.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pembawa
5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Induk Distribusi
5.2.3.79.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi
5.2.3.79.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah
5.2.3.80	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik
5.2.3.80.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi
5.2.3.80.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi
5.2.3.81	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon
5.2.3.81.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah
5.2.3.81.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah
5.2.3.81.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Didalam Air
5.2.3.82	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas
5.2.3.82.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi
5.2.3.82.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi
5.2.3.82.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Dinas
5.2.3.82.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan BBM
5.2.3.83	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
5.2.3.83.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
5.2.3.83.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat
5.2.3.83.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan
5.2.3.83.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial
5.2.3.83.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa
5.2.3.83.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam
5.2.3.83.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis

5 . 2 . 3 . 83 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga
5 . 2 . 3 . 83 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah
5 . 2 . 3 . 83 . 10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Undang-Undang
5 . 2 . 3 . 84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan
5 . 2 . 3 . 84 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala
5 . 2 . 3 . 84 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan
5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan
5 . 2 . 3 . 85 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta
5 . 2 . 3 . 85 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)
5 . 2 . 3 . 85 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Musik
5 . 2 . 3 . 85 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)
5 . 2 . 3 . 85 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita
5 . 2 . 3 . 85 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Bentuk Micro (Microform)
5 . 2 . 3 . 85 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara
5 . 2 . 3 . 85 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)
5 . 2 . 3 . 85 . 09	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video
5 . 2 . 3 . 85 . 10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt
5 . 2 . 3 . 86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
5 . 2 . 3 . 86 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan
5 . 2 . 3 . 86 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan
5 . 2 . 3 . 86 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian
5 . 2 . 3 . 86 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga
5 . 2 . 3 . 86 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tanda Penghargaan
5 . 2 . 3 . 86 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen
5 . 2 . 3 . 86 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah
5 . 2 . 3 . 86 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan
5 . 2 . 3 . 87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
5 . 2 . 3 . 87 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam
5 . 2 . 3 . 87 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air
5 . 2 . 3 . 87 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Udara
5 . 2 . 3 . 87 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
5 . 2 . 3 . 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan
5 . 2 . 3 . 88 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak
5 . 2 . 3 . 88 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Unggas
5 . 2 . 3 . 88 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Melata
5 . 2 . 3 . 88 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan
5 . 2 . 3 . 88 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Kebun Binatang
5 . 2 . 3 . 88 . 06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Pengamanan
5 . 2 . 3 . 89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman
5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan
5 . 2 . 3 . 89 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Holtikultura
5 . 2 . 3 . 89 . 03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Kehutanan
5 . 2 . 3 . 89 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias
5 . 2 . 3 . 89 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika
5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Umum
5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal Pengadaan Sarana Taman
5 . 2 . 3 . 90 . 02	Belanja Modal Pengadaan Sarana Jalan

5.2.3.90.03	Belanja Modal Pengadaan Sarana Peribadahan
5.2.3.90.04	Belanja Modal Pengadaan Sarana Wisata
5.2.3.90.05	Belanja Modal Pengadaan Sarana Perdagangan
5.2.3.98	Belanja Modal Dana BOS
5.2.3.98.01	Belanja Modal Dana BOS
5.2.3.99	Belanja Modal Dana BLUD
5.2.3.99.01	Belanja Modal Dana BLUD
6	PEMBIAYAAN DAERAH
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.1.1	Penggunaan SiLPA
6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD
6.1.1.01.01	Pajak Daerah
6.1.1.01.02	Retribusi Daerah
6.1.1.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.1.01.04	Lain-Lain PAD yang Sah
6.1.1.01.05	Pajak Daerah
6.1.1.02	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan
6.1.1.02.01	Bagi Hasil Pajak
6.1.1.02.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
6.1.1.02.03	Dana Alokasi Umum
6.1.1.02.04	Dana Alokasi Khusus
6.1.1.02.05	Dst...
6.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
6.1.1.03.01	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung
6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa
6.1.1.04.04	Belanja Modal
6.1.1.04.05	Belanja Bunga
6.1.1.04.06	Belanja Subsidi
6.1.1.04.07	Belanja Hibah
6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial
6.1.1.04.09	Belanja Belanja Bagi Hasil
6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan
6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga
6.1.1.05	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan
6.1.1.05.01	Potongan Taspen
6.1.1.05.02	Askes
6.1.1.05.03	PPh Pusat
6.1.1.05.04	PPN Pusat
6.1.1.05.05	Taperum
6.1.1.05.06	Pihak Ketiga Lainnya
6.1.1.06	Sisa Belanja DAK
6.1.1.06.01	DAK Bidang Pendidikan
6.1.1.06.02	DAK Bidang Kesehatan
6.1.1.06.03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan
6.1.1.06.04	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
6.1.1.06.05	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum
6.1.1.06.06	DAK Bidang Insfrastruktur Sanitasi
6.1.1.06.07	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
6.1.1.08	Koreksi SiLPA
6.1.1.08.01	Koreksi SiLPA
6.1.1.08.02	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
6.1.1.08.03	Lain-Lain
6.1.1.09	Sisa Belanja DAK

6.1.1.09.01	DAK Bidang Pendidikan
6.1.1.09.02	DAK Bidang Kesehatan
6.1.1.09.03	DAK Bidang Infrastruktur
6.1.1.09.04	Dst.....
6.1.1.10	Sisa Belanja Dana Bagi Hasil
6.1.1.10.01	Dana Bagi Hasil PBB
6.1.1.10.02	Dana Bagi Hasil PPh
6.1.1.10.03	Dana Bagi Hasil SDA Iuran Hak Pengusaha Hutan
6.1.1.10.04	Dana Bagi Hasil SDA Sumber Daya Hutan
6.1.1.10.05	Dana Bagi Hasil DR
6.1.1.10.06	Dst.....
6.1.1.11	Sisa Belanja Dana Penyesuaian
6.1.1.11.01	Dana Penyesuaian BOS
6.1.1.11.02	Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru PNSD
6.1.1.11.03	Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD
6.1.1.11.04	Dana Penyesuaian Tunjangan Sertifikasi Guru PNSD
6.1.1.11.05	Dana Penyesuaian DID
6.1.1.11.06	Dst.....
6.1.1.12	Sisa Belanja Dana Otonomi Khusus
6.1.1.12.01	Dana Otonomi Khusus Aceh
6.1.1.12.02	Dana Otonomi Khusus Papua
6.1.1.12.03	Dana Otonomi Khusus Papua Barat
6.1.1.12.04	Dst.....
6.1.1.13	Sisa Belanja Dana Tambahan Infrastruktur
6.1.1.13.01	Dana Tambahan Infrastruktur Papua
6.1.1.13.02	Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat
6.1.1.13.03	Dst.....
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan
6.1.2.01	Pencairan Dana Cadangan
6.1.2.01.01	Pencairan Dana Cadangan Nomor
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
6.1.3.01	Hasil Penjualan Perusahaan Milik Daerah/BUMD
6.1.3.01.01	BUMD
6.1.3.02	Hasil Penjualan Aset Milik Pemerintah Daerah yang Dikerjasamakan Dengan Pihak Ketiga
6.1.3.02.01	Hasil Penjualan Aset Milik Pemerintah Daerah yang Dikerjasamakan Dengan Pihak Ketiga
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah
6.1.4.01	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah
6.1.4.01.01	Penerusan Pinjaman
6.1.4.02	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Daerah Lain
6.1.4.02.01	Pemerintah Daerah
6.1.4.03	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank
6.1.4.03.01	Bank
6.1.4.04	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
6.1.4.04.01	Lembaga Keuangan Bukan Bank
6.1.4.05	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
6.1.4.05.01	Obligasi Atas Nama
6.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman
6.1.5.01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6.1.5.01.01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
6.1.6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
6.1.6.01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Daerah

6.1.6.01.01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Pajak Daerah
6.1.6.01.02	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Retribusi Daerah
6.1.6.01.03	Penerimaan Piutang Daerah Dari Lain-lain Pendapatan yang Sah
6.1.6.02	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pemerintah
6.1.6.02.01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pemerintah
6.1.6.03	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pemerintah Daerah Lain
6.1.6.03.01	Pemerintah Daerah
6.1.6.04	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
6.1.6.04.01	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
6.1.6.05	Penerimaan Piutang Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
6.1.6.05.01	Lembaga Keuangan Bukan Bank
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan
6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan Nomor
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
6.2.2.01	Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN)
6.2.2.01.01	BUMN
6.2.2.02	Penyertaan Modal pada BUMD
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah
6.2.2.02.02	Penyertaan Modal pada PDAM
6.2.2.02.03	Penyertaan Modal pada PT. WWS Kota Sawahlunto
6.2.2.03	Badan Usaha Milik Swasta
6.2.2.03.01	Badan
6.2.2.04	Dana Bergulir
6.2.2.04.01	Dana Bergulir
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang
6.2.3.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah
6.2.3.01.01	Penerusan Pinjaman Pemerintah RI Kepada Pemerintah Daerah
6.2.3.02	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Daerah Lain
6.2.3.02.01	Pemerintah Daerah
6.2.3.03	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank
6.2.3.03.01	Bank BPD Simulasi
6.2.3.04	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
6.2.3.04.01	Lembaga Keuangan Bukan Bank
6.2.3.05	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Pemerintah
6.2.3.05.01	Penerusan Pinjaman
6.2.3.06	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Daerah Lain
6.2.3.06.01	Pemerintah Daerah
6.2.3.07	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank
6.2.3.07.01	Bank
6.2.3.08	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
6.2.3.08.01	Lembaga Keuangan Bukan Bank
6.2.3.09	Pelunasan Obligasi Daerah Pada Saat Jatuh Tempo
6.2.3.09.01	Obligasi Atas Nama
6.2.3.10	Pembelian Kembali Obligasi Daerah Sebelum Jatuh Tempo
6.2.3.10.01	Obligasi Atas Nama

6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah
6.2.4.01	Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah
6.2.4.01.01	Pemerintah
6.2.4.02	Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lain
6.2.4.02.01	Pemerintah Daerah
6.3	PEMBIAYAAN NETTO
6.3.1	Pembiayaan Netto
6.3.1.01	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan
6.3.1.01.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
6.4	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
6.4.1	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
6.4.1.01	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
6.4.1.01.01	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERVASTA